MAJALAH

Parlementaria

Mengawal Pemerintahan Baru

EDISI 239
TH. 2024

Biro Pemberitaan Parlemen

Parlementaria

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.IP., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan,
Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

4 PROLOG
Mengawal Pemerintahan Baru

6 LAPORAN UTAMA
- Berharap Ada Perubahan Signifikan
- Merancang Ulang Mitra AKD
- Biarkan Kabinet Merah Putih Bekerja
- Mengejar Pertumbuhan Ekonomi
- Mengusung Program Unggulan

16 SUMBANG SARAN
Mengawal Pemerintahan Baru

18 PENGAWASAN
Meningkatkan Kesejahteraan Hakim

20 ANGGARAN
Optimisme dan Tantangan Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

22 LEGISLASI
Revisi UU Paten : Mendorong Inovasi dan Kepastian Hukum

24 FOTO BERITA

28 LENSA PARLE
DPR Kawal Janji Presiden di Hadapan Rakyat Indonesia

30 PROFIL
Netty Prasetyani : Jembatan Aspirasi Rakyat di DPR

PENGAWASAN

Meningkatkan Kesejahteraan Hakim

18

ANGGARAN

20

Optimisme dan Tantangan Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

SOROTAN

56

Menjaga Kekayaan Pasir Laut

34 KUNKER

56 SOROTAN
Menjaga Kekayaan Pasir Laut

58 LIPUTAN KHUSUS
Diplomasi Parlemen Perkuat Identitas Bangsa

60 DAPIL

69 WISATA
Istana Kuning dan Coto Manggala

72 TOKOH
Triana Rahmawati
Peduli Penderita Gangguan Jiwa

74 PERNIK
Biro Pemberitaan Parlemen

76 KIAT SEHAT
Menjaga Kesehatan Mental Pada Ibu Pekerja. Apakah Penting ?

78 HOBI
Gamal Albinsaid
Aktif Berolahraga dan Menulis

79 POJOK PARLE
Kala Ultraman Masuk Senayan

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI

EMedia DPR RI

Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id

DPR RI DPR RI @dpr_ri @dpr_ri @dpr_ri @dpr_ri

w w w . d p r . g o . i d

Mengawal Pemerintahan Baru

Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu, menjadi babak baru dalam perjalanan politik negeri ini. Ketua DPR RI Puan Maharani, tidak hanya hadir sebagai tamu penting, tetapi juga memberikan pandangannya yang optimis atas pidato pertama Prabowo.

SEMANGAT kebersamaan di ruang sidang paripurna MPR RI terlihat kentara. Raut wajah para legislator sumringah, bahagia. Inilah semangat baru, harapan baru, bahkan mimpi baru, menyambut presiden dan wakil presiden baru. Gedung parlemen di Senayan juga sangat terasa dengan atmosfir baru, karena banyak diisi wajah-wajah baru.

Sebagai ketua DPR RI, Puan juga menyampaikan pernyataan positif atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Semangat dan cita-citanya untuk membangun Indonesia secara gotong royong, seperti yang Bung Karno ajarkan, sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini." katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan, sebuah ajakan yang mendapat apresiasi dari Puan. Ia menegaskan bahwa membangun Indonesia tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa.

> **Semangat dan cita-citanya untuk membangun Indonesia secara gotong royong, seperti yang Bung Karno ajarkan, sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini**
>
> **Puan Maharani**
> **Ketua DPR RI**

Namun, di balik momen penuh simbolik tersebut, DPR RI tengah bersiap menjalankan tugas pentingnya sebagai pengawas utama jalannya pemerintahan. Dengan pemerintahan baru di bawah Prabowo, fungsi pengawasan DPR semakin krusial dalam memastikan pemerintahan bekerja sesuai janji dan harapan rakyat.

Usai pelantikan, DPR langsung fokus pada pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Menurut Puan, DPR akan segera menyesuaikan struktur komisi-komisi dengan nomenklatur kementerian di kabinet baru yang dipimpin Prabowo. Hal ini menjadi langkah penting agar DPR dapat menjalin kemitraan strategis dengan kementerian dan lembaga yang akan menjadi mitra kerjanya.

DPR telah menambah dua komisi baru, menyesuaikan dengan potensi bertambahnya kementerian di era Prabowo. "Pembagian tugas komisi nanti akan disesuaikan dengan jumlah kementerian yang diumumkan oleh Presiden Prabowo," jelas Puan.

Penambahan komisi ini bertujuan agar setiap kementerian memiliki mitra yang lebih fokus, sehingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bisa lebih mendalam. DPR, sebagai representasi rakyat, akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Di era digital dan informasi yang berkembang pesat, peran pengawasan DPR tak lagi sekadar menjalankan formalitas. Fungsi pengawasan kini harus mampu menangkap dinamika yang terjadi di masyarakat, memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Melalui komisi-komisi yang dibentuk, DPR berfungsi melakukan pengawasan secara langsung terhadap implementasi program-program pemerintah. Dalam hal ini, setiap komisi akan menjadi mitra kerja kementerian, yang berarti setiap langkah yang diambil oleh kementerian harus dapat dipertanggungjawabkan di depan DPR.

> **Penambahan komisi ini bertujuan agar setiap kementerian memiliki mitra yang lebih fokus, sehingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bisa lebih mendalam. DPR, sebagai representasi rakyat**
>
> **Puan Maharani**
> **Ketua DPR RI**

Sebagai contoh, Komisi XI yang membidangi keuangan akan mengawasi kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Komisi ini memiliki peran penting dalam memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Begitu pula dengan komisi-komisi lain yang memiliki tanggung jawab di bidang masing-masing.

Puan juga berharap proses penataan AKD berjalan cepat, agar DPR dapat segera menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif. "Kami ingin kinerja DPR selaras dengan pemerintah, mencerminkan akselerasi yang sama, terutama dalam hal pengawasan dan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat," ucap Puan.

Dengan kabinet baru yang segera terbentuk, tugas berat menanti DPR RI untuk menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi. Agar langkah-langkah pemerintahan berada di jalur yang benar, sesuai dengan harapan masyarakat. .

Berharap Ada Perubahan Signifikan

Sejumlah harapan terus menumpuk pada pemerintahan baru. Tentu bukan sekadar harapan belaka, tapi menuntut perubahan nyata yang harus terwujud. Perubahan yang positif bagi bangsa ini. Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan baru diharapkan membawa perubahan signifikan bagi Bangsa Indonesia.

DITEMUI usai pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung Nusantara, Anggota DPR RI Rahmat Saleh menitipkan sejumlah harapan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap, kepemimpinan Prabowo dapat membawa perubahan signifikan bagi bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan global dan memperkuat kemandirian nasional.

Menurutnya, visi dan misi Prabowo yang diusung selama kampanye perlu segera diimplementasikan untuk menjawab persoalan mendesak, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan penguatan ekonomi. "Kami menaruh harapan besar agar pemerintah mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan

> **Visi dan misi Prabowo yang diusung selama kampanye perlu segera diimplementasikan**
>
> **Rahmat Saleh**
> **Anggota DPR RI**

FOTO: DOK

Rahmat Saleh (kedua dari kanan) bersama para koleganya dari F-PKS DPR RI.

taraf hidup masyarakat, khususnya di daerah tertinggal dan sektor UMKM," katanya di Gedung Nusantara, MPR/DPR, 20 Oktober lalu.

Rahmat menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang bisa memupuk persatuan dan rasa kebersamaan di tengah perbedaan. "Harapan kami, Pak Prabowo mampu menjaga keharmonisan di seluruh elemen bangsa dan memastikan keadilan merata ke seluruh pelosok negeri," lanjutnya.

Di tingkat internasional, Rahmat berharap presiden dapat memposisikan Indonesia lebih kuat dengan kebijakan luar negeri yang tegas dan aktif. "Kita melihat saat ini potensi Indonesia untuk berperan lebih besar dalam isu-isu global, termasuk menjaga perdamaian dunia dan memperkuat kerja sama internasional," kata politisi PKS ini.

Rahmat menegaskan, harapan masyarakat kepada pemerintahan baru sangat tinggi, dan kebijakan-kebijakan konkret diharapkan segera diwujudkan untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih nyata. "Kita pastinya berharap semua yang telah disampaikan saat kampanye Pilpres lalu dapat terealisasikan ke rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan ke depan yang kita nantikan, tentunya harus pro rakyat," pungkasnya.

> **Pemerintah yang baru juga turut berpartisipasi aktif dalam memberikan program yang strategis dan berkelanjutan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara**
>
> **Izzuddin Alqassam**
> **Anggota DPR RI**

FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Izzuddin Alqassam kasuba saat menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029.

Sementara itu, di tempat yang sama, Anggota DPR RI Izzuddin Alqassam kasuba berharap, kepemimpinan Prabowo membawa perubahan positif. Tak hanya perubahan positif, lebih dari itu kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai salah satu anggota DPR termuda, ia pun menyatakan, setelah pelantikan ini pemerintah segera melakukan berbagai terobosan nyata terkait implementasi program yang langsung menyentuh persoalan kerakyatan.

Qassam juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan legislatif untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah, Qassam akan memaksimalkan fungsi dan tugasnya sebagai anggota legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, terutama implementasi program-program yang telah dicanangkan pemerintah agar dapat langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Qassam juga menitipkan aspirasi dan harapan masyarakat daerah pemilihannya, yaitu Maluku Utara. "Agar pemerintah yang baru juga turut berpartisipasi aktif dalam memberikan program yang strategis dan berkelanjutan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara," serunya.

Politisi PKS ini mengapresiasi Presiden Prabowo yang konsisten memperjuangkan Palestina menjadi negara merdeka. " Apresiasi dan hormat terkait pernyataan langsung Pak Prabowo sebagai satu penegasan dukungan kepada Palestina. Semoga di masa Presiden Prabowo dengan kemampuan diplomasinya yang mumpuni menjadi titik terang terwujudnya negara Palestina merdeka secara utuh," tutupnya. **tn/mh**

Merancang Ulang Mitra AKD

Di tengah atmosfer politik yang terus bergerak dinamis, DPR RI kini tengah melakukan pembenahan internal. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki tanggung jawab besar mengawasi jalannya pemerintahan. Maka, tak mengherankan jika kini berfokus pada penataan ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pemilihan mitra-mitra strategis untuk memperkuat peran pengawasan.

WAKIL Ketua DPR RI. Saan Mustopa, menjelaskan bahwa hingga saat ini, DPR telah mengukuhkan 13 komisi yang akan berfungsi sebagai bagian dari AKD. Tak hanya itu, sebuah badan baru, Badan Aspirasi Rakyat, turut dibentuk untuk menampung suara publik. Meskipun demikian, penetapan mitra dan anggota komisi masih dalam proses finalisasi, yang rencananya akan dibahas dalam rapat yang melibatkan seluruh unsur pimpinan fraksi, pasca pengumuman struktur kementerian oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Malam ini begitu nomenklatur kementerian diumumkan secara resmi, maka DPR akan segera menindaklanjutinya dengan pembagian mitra kementerian dan lembaga pada tiap komisi, dari Komisi I hingga XIII," ungkap Saan di sela-sela acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Gedung DPR RI, Minggu, 20.Oktober lalu.

Saan juga menjelaskan bahwa fraksi-fraksi di DPR telah menyusun nama-nama anggota yang akan ditempatkan di masing-masing komisi. Harapannya, penetapan ini bisa selesai dalam waktu yang singkat, memungkinkan DPR untuk segera bekerja lebih efektif bersama mitra-mitranya. "Setiap fraksi tengah mengirimkan daftar nama anggota mereka yang akan bertugas di komisi-komisi, termasuk badan-badan dan pimpinan komisi," katanya.

Dengan semangat baru, DPR berharap proses akselerasi ini dapat berjalan seiring dengan pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo. "Kami ingin kinerja DPR selaras dengan pemerintah, mencerminkan akselerasi yang sama, terutama dalam hal pengawasan dan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat," imbuh Saan lagi.

Upaya DPR RI dalam memperbaiki struktur internal ini diharapkan mampu meningkatkan peran mereka sebagai pengawas utama pemerintahan, memastikan setiap kebijakan yang diambil dan tetap sejalan dengan kepentingan rakyat. **ssb/mh**

FOTO: MENTARI/VEL

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, saat diwawancarai di sela-sela menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Gedung DPR RI, Minggu (20/10/2024).

Biarkan Kabinet Merah Putih Bekerja

Kabinet Merah Putih baru terbentuk satu hari setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kabinet yang dibentuk pun harus bekerja keras mengejar targetnya.

FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Ferdiansyah.

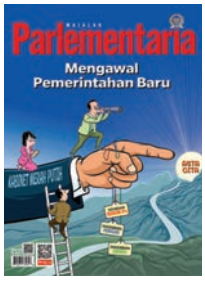

DUKUNGAN terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disampaikan Anggota DPR RI Ferdiansyah. Ia mengimbau publik memberi kesempatan kepada kabinet baru bekerja. "Perlu komitmen dan konsistensi dalam bertindak. Hal ini tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi para pembantunya untuk memiliki komitmen dan konsistensi bagi kemasalahatan rakyat Indonesia," ujar Ferdi yang ditemui Parlementaria, Minggu (20/10) lalu.

Dikatakannya, ada begitu banyak tantangan, baik internal dan global yang memang menjadi fokus dan prioritas bagi presiden untuk menyelesaikan tugas tersebut dalam kurun waktu lima tahun. Ferdi menyambut positif pidato perdana Prabowo di MPR/DPR usai dilantik yang dihadiri para pemimpin negara-negara sahabat.

Menurut Ferdi, menyangkut politik luar negeri, Indonesia tetap di garis non blok dan bebas aktif. Prabowo seolah ingin menegaskan kembali politik luar negeri yang dianut Indonesia tersebut. Termasuk pengakuan bagi Negara Palestina. Di awal kemerdekaan Indonesia, Palestinalah yang memberi pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia.

Hal tersebut semakin menegaskan tentang komitmen Presiden Prabowo yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Termasuk hak kemerdekaan sebuah negara. Sehingga, penjajahan di atas muka dunia harus dihapuskan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

"Jadi, Pak Presiden Prabowo menegaskan bahwa segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan, baik itu penjajahan yang sifatnya ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Ini menjadi catatan kami terkait komitmen Presiden Prabowo dalam pidato perdananya," ungkapnya.

Yang tidak kalah pentingnya, lanjut Ferdi, disiplin dan tanggung jawab seseorang yang menjadi karakter dasar Presiden Prabowo sebagai seorang TNI. Di sini terlihat jelas, harapan presiden kepada para menteri/wamen dan kepala badan dalam Kainet Merah Putih ini, untuk selalu mengedepankan disiplin dan tanggung jawab. Tentu dalam hal ini secara tidak langsung presiden berharap seluruh pembantunya berlari kencang untuk menjawab tantangan dan harapan masyarakat dan bangsa.

Terkait jumlah kementerian yang bertambah, tentu membawa konsekuensi terhadap penambahan jumlah pejabat negara. Menurut Ferdi, hal tersebut menjadi konsekuensi yang tidak bisa terelakan. Dalam konteks menjawab tantangan ke depan yang cukup besar, ia menilai efektivitas harus dikedepankan. Sementara efisensi menyusul di belakakngnya.

Sebagai anggota DPR RI, Ferdi mengaku, saat ini berkomitmen mendukung pemerintahan baru. Masyarakat sekali lagi, diimbau memberikan kesempatan kepada kabinet untuk bekerja lebih dahulu demi bangsa dan negara. **ayu/mh**

Mengejar Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, memang, harus diperjuangkan. Untuk mengejarnya, pemerintah mesti mengefisienkan investasi melalui penurunan Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) dan hilirisasi sektor-sektor potensial seperti kelautan.

USAI menyaksikan pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Anggota DPR RI Ravindra Airlangga, menyampaikan pandangannya soal tantangan ekonomi Indonesia dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Dalam wawancara baru-baru ini, Ravindra menyoroti pentingnya efisiensi investasi melalui penurunan ICOR.

"Kita harus meningkatkan efisiensi investasi dengan menurunkan ICOR agar pertumbuhan ekonomi lebih optimal. Selain itu, hilirisasi produk seperti rumput laut sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah, misalnya dalam sektor farmasi," ujar Ravindra di Jakarta, akhir Oktober lalu.

Selain fokus pada hilirisasi, politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya menyiapkan Indonesia menghadapi tahun emas 2045. Salah satu upaya yang ia soroti adalah menurunkan angka stunting dengan program makan siang gratis bagi anak-anak. "Penurunan angka stunting merupakan salah satu prioritas, dan program makan siang

FOTO: MENTARI/VEL

Anggota DPR RI, Ravindra Airlangga, saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

gratis adalah langkah konkret untuk mencapai itu," tambahnya.

Ravindra juga mengapresiasi peran masyarakat, terutama UMKM, dalam perekonomian nasional. Menurutnya, UMKM adalah penggerak utama ekonomi dan harus terus dilibatkan dalam berbagai rencana pembangunan. "Peran UMKM sangat penting karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. Saya yakin, pemerintah akan terus melibatkan UMKM dalam pembangunan," ungkapnya.

Mengenai kepemimpinan Sri Mulyani yang kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, Ravindra menilai ini sebagai sinyal positif. "Kembalinya Ibu Sri Mulyani menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengedepankan kebijakan ekonomi yang hati-hati dan terukur, terutama dalam mencapai standar makro ekonomi global," jelasnya.

Terkait sektor perpajakan, Ravindra optimis bahwa target peningkatan penerimaan pajak akan tercapai dengan memperluas tax base. "Ada upaya untuk memperbesar basis pajak dengan mengoptimalkan wajib pajak yang selama ini belum membayar," kilahnya.

Ravindra juga mengekspresikan keyakinannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, terutama di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. "Indonesia harus memainkan peran lebih sentral dalam menghadapi tantangan global saat ini," serunya dengan penuh optimisme.

Setia Konstitusi

Sementara itu Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka berharap agar Presiden Prabowo berkomitmen setia pada konstitusi negara, sambil menyampaikan ucapan selamat kepad presiden dan wakil presiden baru. "Selamat untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah dilantik, semoga kita bisa berjuang bersama-sama sesuai dengan amanat konstitusi." katanya.

FOTO: FARHAN/VEL

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat menghadiri pelantikan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Rieke pun menyoroti beberapa hal yang disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden Indonesia, khususnya soal kesetiaan pada konstitusi yang sangat penting. "Dalam pidato pertamanya sebagai pidato kenegaraan presiden adalah kesetiaan terhadap konstitusi dan sebesar-besarnya memperjuangkan bukan kepentingan diri sendiri, keluarga maupun kelompok golongan," paparnya.

Ia menyambut baik komitmen Prabowo yang mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta konstitusi negara lainnya dalam upaya berbakti kepada bangsa dan negara. Ia mengatakan, kesetiaan pada konstitusi memang harus dijalankan oleh para pemangku kebijakan sesuai amanat UUD 1945.

"Presiden terpilih mengingatkan perjuangan kita ke depan, insyaallah benar-benar bisa konsisten bersama kita memperjuangkan rakyat bangsa dan negara seadil-adilnya, selurus-lurusnya," tegas Rieke. Lebih lanjut, Rieke berharap, pemerintahan baru bersama DPR bisa melakukan kerja-kerja yang lebih konkret lagi.

"Kita memiliki visi yang sama sebetulnya yang diamanatkan pembukaan UUD 1945. Misi kita semua adalah bersatu berdaulat adil dan makmur. Misinya juga tidak boleh berubah," sebutnya yang ditemui di gedung DPR RI, usain pelantikan, 20 Oktober lalu.

Adapun misi yang dimaksud Rieke tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. **tn/mh**

Mengusung Program Unggulan

Tak menunggu waktu lama, beberapa jam usai pelantikan, Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan kabinetnya yang dinamai dengan Kabinet Merah Putih. Ada 48 nama menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator, serta 59 wakil menteri yang akan membantu pemerintahannya untuk periode 2024-2029.

FOTO: MENTARI/VEL

Anggota DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat menghadiri pelantikan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

KABINET yang dipandang gemuk itu, merupakan kebijakan presiden untuk menghadapi berbagai persoalan berat yang dihadapi Indonesia. Adalah Anggota DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi yang menilai, kabinet ini, memang, difokuskan untuk keluar dari berbagai masalah yang membelit bangsa.

"Saya sendiri, kebetulan dalam periode sebelumnya ikut memimpin Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi masalah pendidikan, mengusulkan kementerian tersebut dipecah menjadi tiga. Karena pembagian kewenangan sebagian sudah ada di daerah. Tetapi sebenarnya kuncinya bukan kementerian itu dipecah atau tidak dipecah, namun "The man behind the gun" ini sangat penting.

Siapapun yang ditugaskan sebagai menteri harus punya satu komitmen, tandas Dede yang ditemui

usai pelantikan presiden, 20 Oktober lalu itu. Bahkan, Dede memberikan target dua tahun bagi seorang menteri dan wamen untuk memenuii target yang dibebankan. Kalau dua tahun tidak mencapai target, maka harus dievaluasi. Ia menilai, satu tahun bagi kementerian yang dipecah itu belum bisa berbuat apa-apa. Itu karena gedung dan anggarannya belum ada.

Setelah dua tahun, akan terlihat kinerja atau performanya. Akhirnya, semua kembali kepada presiden untuk melakukan evaluasi pada para menterinya. Lebih lanjut Dede melihat pemisahan beberapa kementerian sejatinya bukan sebuah pembengkakan anggaran. Ia malah melihat sebaliknya. Anggaran yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 mendatang dalam APBN yang hanya untuk satu kementerian misalnya, karena dipisah, maka anggaran yang ada pun dibagi-bagi ke beberapa kementerian.

Sebut saja yang pada awalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, pada Kabinet Merah Putih dipisah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Maka anggaran untuk bidang pendidikan itu pun dipisah untuk dua kementerian. Baru kemudian kementerian tersebut melakukan perubahan dalam bulan Januari atau Februari.

> **Program unggulan yang diusung Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia ke depan adalah kemandirian pangan dan kemandirian energi dengan hilirisasi.**
>
> **Dede Yusuf Macan Effendi**
> **Anggota DPR RI**

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Demokrat ini melihat, sikap optimis Presiden Prabowo kepada para pembantunya dalam Kabinet Merah Putih tersebut. Presiden sendiri dalam pidato perdananya mengaku ada permasalahan besar yang harus dihadapi bersama. Sebut saja utang yang cukup besar, permasalahan resesi ekonomi di depan, dan perang terbuka Timur Tengah yang akan berdampak bagi Indonesia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menilai program unggulan yang diusung Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia ke depan adalah kemandirian pangan dan kemandirian energi dengan hilirisasi. Artinya, ada sedikit persamaan antara Presiden Prabowo dengan Presiden RI ke-6, SBY saat memimpin, yakni mengutamakan UMKM (usaha mikro kecil menengah).

Dengan kata lain lebih mengutamakan peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan bukan kepada belanja infrastuktur yang terlalu berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

"Intinya, dengan berbagai program unggulan yang telah disusun oleh Presiden Prabowo, kami di DPR pun tentu akan selalu mendukung penuh hal tersebut. Termasuk dalam hal penganggaran, serta pembentukan regulasi yang dibutuhkan. Namun, sebagaimana tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada kami. Termasuk fungsi pengawasan, kami juga akan tetap menjalankan fungsi tersebut, agar sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tujuan utama Presiden Prabowo menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia dapat terwujud," tutupnya.

ayu/mh

MITRA KERJA AKD DPR RI

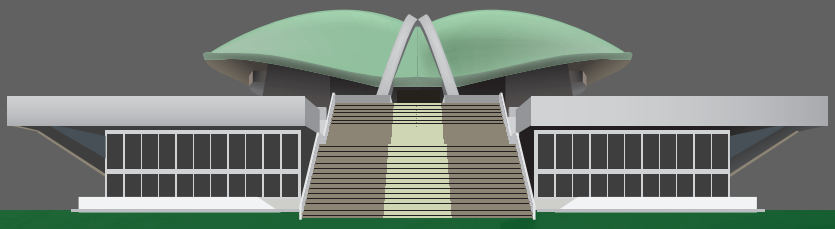

KOMISI I DPR RI

1. Mitra kerja Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Digital
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

KOMISI II DPR RI

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

KOMISI III DPR RI

1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN).

KOMISI IV DPR RI

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

KOMISI V DPR RI

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4. Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

KOMISI VI DPR RI

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

KOMISI VII DPR RI

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

KOMISI VIII DPR RI

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

KOMISI IX DPR RI

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

KOMISI X DPR RI

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik

KOMISI XI DPR RI

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5. Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Jenderal
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
10. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
11. BUMN (PMN dan Privatisasi) (BRIN)

KOMISI XII DPR RI

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

KOMISI XIII DPR RI

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPD RI
10. Sekretariat Jenderal MPR RI
11. Kantor Staf Presiden (KSP)

DAFTAR MENTERI & WAKIL MENTERI KABINET MERAH PUTIH PRABOWO-GIBRAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
Menteri : **BUDI GUNAWAN**
Wa. Menteri : Lodewijk F. Paulus

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
Menteri : **YUSRIL IHZA MAHENDRA**
Wa. Menteri : Otto Hasibuan

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Menteri : **AIRLANGGA HARTARTO**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Menteri : **PRATIKNO**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Menteri : **AGUS HARIMURTI YUDHOYONO**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Menteri : **ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
Menteri : **ZULKIFLI HASAN**

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
Menteri : **PRASETYO HADI**
Wa. Menteri : 1. Bambang Eko Suharyanto
2. Juri Ardiantoro

MENTERI DALAM NEGERI
Menteri : **MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**
Wa. Menteri : 1. Bima Arya Sugiarto
2. Ribka Haluk

MENTERI LUAR NEGERI
Menteri : **SUGIONO**
Wa. Menteri : 1. Muhammad Anis Matta
2. Arrmanatha Christiawan Nasir
3. Arif Havas Oegroseno

MENTERI PERTAHANAN
Menteri : **SJAFRIE SJAMSOEDDIN**
Wa. Menteri : Donny Ermawan Taufanto

MENTERI AGAMA
Menteri : **NASARUDDIN UMAR**
Wa. Menteri : R. Muhammad Syafi'i

MENTERI HUKUM
Menteri : **SUPRATMAN ANDI AGTAS**
Wa. Menteri : Edward Omar Sharif Hiariej

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
Menteri : **NATALIUS PIGAI**
Wa. Menteri : Mugiyanto

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Menteri : **AGUS ANDRIANTO**
Wa. Menteri : Silmy Karim

MENTERI KEUANGAN
Menteri : **SRI MULYANI INDRAWATI**
Wa. Menteri : 1. Thomas AM Djiwandono
2. Suahasil Nazara
3. Anggito Abimanyu

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Menteri : **ABDUL MU'TI**
Wa. Menteri : 1. Fajar Riza Ul Haq
2. Atip Latipulhayat

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Menteri : **SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO**
Wa. Menteri : 1. Fauzan
2. Stella Christie

MENTERI KEBUDAYAAN
Menteri : **FADLI ZON**
Wa. Menteri : Giring Ganesha Djumaryo

MENTERI KESEHATAN
Menteri : **BUDI GUNADI SADIKIN**
Wa. Menteri : Dante Saksono Harbuwono

MENTERI SOSIAL
Menteri : **SAIFULLAH YUSUF**
Wa. Menteri : Agus Jabo Priyono

MENTERI KETENAGAKERJAAN
Menteri : **YASSIERLI**
Wa. Menteri : Immanuel Ebenezer Gerungan

MENTERI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Menteri : **ABDUL KADIR KARDING**
Wa. Menteri : 1. Christina Aryani
2. Dzulfikar Ahmad Tawalla

MENTERI PERINDUSTRIAN
Menteri : **AGUS GUMIWANG KARTASASMITA**
Wa. Menteri : Faisol Riza

MENTERI PERDAGANGAN
Menteri : **BUDI SANTOSO**
Wa. Menteri : Dyah Roro Esti Widya Putri

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Menteri : **BAHLIL LAHADALIA**
Wa. Menteri : Yuliot

MENTERI PEKERJAAN UMUM
Menteri : **DODY HANGGODO**
Wa. Menteri : Diana Kusumastuti

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Menteri : **MARUARAR SIRAIT**
Wa. Menteri : Fahri Hamzah

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Menteri : **YANDRI SUSANTO**
Wa. Menteri : Ahmad Riza Patria

MENTERI TRANSMIGRASI
Menteri : **M. IFTITAH SULAIMAN**
Wa. Menteri : Viva Yoga Mauladi

MENTERI PERHUBUNGAN
Menteri : **DODY PURWAGANDHI**
Wa. Menteri : Suntana

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
Menteri : **MEUTYA VIADA HAFID**
Wa. Menteri : 1. Angga Raka Prabowo
2. Nezar Patria

MENTERI PERTANIAN
Menteri : **ANDI AMRAN SULAIMAN**
Wa. Menteri : Sudaryono

MENTERI KEHUTANAN
Menteri : **RAJA JULI ANTONI**
Wa. Menteri : Sulaiman Umar

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menteri : **SAKTI WAHYU TRENGGONO**
Wa. Menteri : Didit Herdiawan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Menteri : **NUSRON WAHID**
Wa. Menteri : Ossy Dermawan

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
Menteri : **RACHMAT PAMBUDY**
Wa. Menteri : Febrian Alphyanto Ruddyard

MENTERI PENDAYAGUNAAN
Menteri : **RINI WIDYANTINI**
Wa. Menteri : Purwadi Arianto

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Menteri : **ERICK THOHIR**
Wa. Menteri : 1. Kartiko Wirjoatmodjo
2. Aminuddin Ma'ruf
3. Dony Oskaria

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BKKBN
Menteri : **WIHAJI**
Wa. Menteri : Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Menteri : **HANIF FAISOL NUROFIQ**
Wa. Menteri : Diaz Faisal Malik Hendropriyono

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Menteri : **ROSAN PERKASA ROESLANI**
Wa. Menteri : Todotua Pasaribu

MENTERI KOPERASI
Menteri : **BUDI ARIE SETIADI**
Wa. Menteri : Ferry Joko Juliantono

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Menteri : **MAMAN ABDURAHMAN**
Wa. Menteri : Helvi Yuni Moraza

MENTERI PARIWISAATA
Menteri : **WIDIANTI PUTRI**
Wa. Menteri : Ni Luh Enik Ermawati

MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
Menteri : **TEUKU RIEFKY HARSYA**
Wa. Menteri : Irene Umar

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Menteri : **ARIFATUL CHOIRI FAUZI**
Wa. Menteri : Veronica Tan

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
Menteri : **ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO**
Wa. Menteri : Taufik Hidayat

PEJABAT SETINGKAT MENTERI

1. **Sanitiar Burhanuddin**
   Jaksa Agung
2. **Muhammad Herindra**
   Kepala Badan Intelijen Negara
3. **M Putranto**
   Kepala Staf Kepresidenan
4. **Hasan Nasbi**
   Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
5. **Luhut Binsar Pandjaitan**
   Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

PANGLIMA TNI, KAPOLRI, DAN SEKRETARIS KABINET

1. **Jenderal Agus Subiyanto**
   Panglima TNI
2. **Jenderal Listyo Sigit Prabowo**
   Kapolri
3. **Teddy Indra Wijaya**
   Sekretaris Kabinet.

Wakil Kepala Staf Kepresidenan

Muhammad Qadari

Mengawal Pemerintahan Baru

Oleh:
Asep Kamaluddin Nashir
Dosen FISIP UPN Veteran Jakarta

Masa pemerintahan Jokowi-Maruf Amin telah berakhir pada 20 Oktober lalu. Tentu banyak peristiwa yang telah dilalui selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia. Menurut survei yang dilakukan LSI Deny JA, sebanyak 80,8% responden yang telah diwawancara merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin menjelang akhir masa jabatannya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja Jokowi-Maruf selama periode kedua mampu menjawab semua harapan masyarakat. Riset terakhir yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia memperlihatkan bahwa alasan utama kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Maruf Amien adalah 1) bantuan untuk rakyat kecil, 2) pembangunan infrastruktur yang masif, 3) pola kempemimpinan pemerintahan yang merakyat, 4) harga kebutuhan yang terkendali, 5) pengurangan kemiskinan, 6) pemerataan pendapatan, 7) penegakan hukum, dan 8) pemberantasan korupsi.

Tidak mudah melanjutkan pemerintahan Jokowi-Maruf dengan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, terlebih berbagai masalah di luar negeri yang semakin memanas, konflik Rusia-Ukraina serta Iran-Israel semakin menyeret berbagai negara di dunia dan diprediksi akan mengganggu stabilitas berbagai kawasan serta hubungan

perdagangan internasional. Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran harus bekerja keras membangun stabilitas nasional sekaligus menjaga stabilitas internasional agar tidak berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang didorong untuk tumbuh mencapai angka 8%.

Konflik internasional yang berujung pada perang yang lama dan masif akan dapat menyebakan krisis multidimensional seperti krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi hingga krisis demokrasi. Beberapa permasalahan ekonomi nasional yang penting untuk disikapi adalah nilai tukar rupiah yang fluktuatif, peningkatan suku bunga, ancaman peningkatan angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat, menurunnya kelas menengah, dan potensi peningkatan utang negara.

Pada saat yang sama, rakyat juga menunggu realisasi beberapa janji-janji politik Prabowo-Gibran mulai dari makan siang gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, melanjutkan program dana desa, BLT, dan rumah murah, dan program kartu kesejahteraan, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, mengembangkan hilirisasi, dan membangun pendidikan dasar menengah, serta perguruan tinggi yang unggul.

Kabinet Merah Putih yang Akomodatif dan Kaya Prestasi

Penetapan 109 anggota kabinet dengan total 48 menteri dan 56 wakil menteri dianggap sebagai kabinet terbanyak sepanjang sejarah. Namun demikian beberapa kementerian baru merupakan pecahan dari kementrerian lainnya yang didorong untuk meningkatkan kefokusan kinerja dan meningkatkan prestasi pelayanan dan pembangunan. Selain itu, kabinet ini dianggap akomodatif

Konflik internasional yang berujung pada perang yang lama dan masif akan dapat menyebakan krisis multidimensional seperti krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi hingga krisis demokrasi.

dan merangkul semua kepentingan politik berbagai komponen yang ada, karena faktor akomodasi, kompetensi, dan representasi menjadi penentu stabilitas pemerintahan untuk mendorong berbagai kemajuan dan memberikan berbagai solusi pembangunan.

Meskipun salah satu janji kampanye pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membentuk badan penerimaan negara belum dapat terealisasi karena rumitnya pola birokrasi kementerian keuangan, serta munculnya kekhawatiran besarnya biaya operasional pemerintahan, namun terlalu prematur untuk menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dari awal pemerintahannya, 100 hari kerja dan 1 tahun perjalanan kabinet menjadi ukuran yang tepat untuk menilai keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam pidato pertamanya Prabowo menyampaikan tentang pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah krisis global yang menyebabkan banyak negara tidak memprioritaskan pangan. Prabowo menjelaskan bahwa selama kepemimpinannya ia akan fokus pada swasembada pangan dan energi dengan mengolah sumber daya serta kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia agar bisa sesegera mungkin melakukan swasembada pangan. Pemerintahan Prabowo dan Gibran juga menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan akan menjadi fokus utama mereka.

Prabowo menyebutkan, jika ia dan pemerintahannya akan merancang kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah baik. Dalam hal pendidikan, Prabowo dan Gibran berencana akan menghadirkan program beasiswa dan pelatihan keterampilan yang dikhususkan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Tindakan tersebut karena pentingnya pendidikan yang merupakan pondasi yang harus dimiliki oleh semua manusia guna menaikkan taraf hidup untuk menyambut Indonesia Emas pada 2045 kelak. Maka, sumber

Dalam pidato pertamanya Prabowo menyampaikan tentang pentingnya swasembada pangan

daya manusia di Indonesia harus berpendidikan. Berbagai program pembangunan tersebut menjadi penting untuk dikawal agar pemerintahan tetap berjalan di rel yang benar dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kritik yang membangun adalah vitamin dan obat agar perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran semakin baik, tentu saja masih belum terlambat untuk mengucapkan terima kasih pada Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin atas dedikasi dan kinerjanya selama ini. Dan selamat bertugas Pak Prabowo dan Pak Gibran, semoga Indonesia makin maju dan sejahtera.

Meningkatkan Kesejahteraan Hakim

Kasus cuti bersama para hakim sempat menghebohkan publik. Ruang-ruang pengadilan sepi, tak ada persidangan. Cuti bersama para hakim itu, sebagai bentuk protes, karena gaji hakim tak kunjung dinaikkan. Aksi cuti bersama ini menunjukan solidaritas organisasi hakim se-Indonesia.

FOTO: DOK/VEL

Anggota DPR RI Nasir Djamil.

Sudah 12 tahun, gaji para hakim tak mendapat perhatian pemerintah. Gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini masih berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012. Aksi ini digelar di penghujung masa pemerintahan Jokowi.

Menanggapi protes itu, Anggota DPR RI Nasir Djamil mengimbau pemerintah merespon desakan para hakim tersebut.

Cuti bersama dinilainya merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari tuntutan hak. Apalagi, para hakim adalah benteng terakhir keadilan. "Aksi mendesak kenaikan gaji dengan cuti bersama oleh hakim itu hal yang wajar dan pemerintah harus meresponsnya agar peradilan di negeri ini berjalan seperti biasanya dan tidak merugikan rakyat lainnya," jelas Nasir, awal Oktober lalu.

Integritas dan "isi tas" para hakim harus seimbang. Antara profesi dan gaji harus mendapat perhatian yang sama. Potret peradilan di negeri ini masih kelam, mengingat

masih banyak ditemui berbagai kasus suap yang dilakukan oleh para hakim. Maka, jangan hanya menuntut integritas dari para hakim, tetapi pemerintah juga wajib memperhatikan isi tas alias kesejahteraan mereka. Kalau tidak seimbang, maka dikhawatirkan akan mengambil isi tas lain, sehingga masuk dalam lingkaran mafia peradilan.

Sebenarnya Komisi III DPR RI periode 2019-2024, khususnya Komisi III sudah menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Namun, usulan legislasi ini tidak direspons oleh pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya terkesan setengah hati membicarakan kesejahteraan hakim. RUU Jabatan Hakim merupakan inisiatif DPR periode kemarin dan belum ditanggapi pemerintah dengan alasan anggaran.

Untuk itu, Nasir yang terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029, mengharapkan RUU Jabatan Hakim ini bisa diteruskan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto. Para hakim menuntut Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung,

> **Jangan hanya menuntut integritas dari para hakim, tetapi pemerintah juga wajib memperhatikan isi tas alias kesejahteraan mereka.**
>
> **Nasir Djmail**
> **Anggota DPR RI**

FOTO: JAKA/VEL

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memberikan keterangan kepada awak media menerima dari Audiensi Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.

untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.

Pemerintah juga didesak menyusun peraturan perlindungan jaminan keamanan bagi hakim, mengingat banyak insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai wilayah pengadilan.

DPR sendiri sebetulnya tidak tinggal diam ketika mengetahui para hakim menuntut kesejahteraannya. Terbukti, Pimpinan DPR RI lengkap menerima audiensi dengan perwakilan hakim di kompleks parlemen. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, parlemen juga sudah berkomunikasi dengan pihak eksekutif untuk membahas persoalan peningkatan kesejahteraan hakim Indonesia.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyampaikan secara langsung tuntutan para hakim oleh Dasco kepada Presiden terpilih waktu itu, Prabowo Subianto yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan pemerintahan. Prabowo sendiri dalam sambungan telepon langsung yang diterima Sufmi Dasco, berjanji akan menaikkan kesejahteraan para hakim.

Diungkapkannya, tuntutan kesejahteraan hakim tidak hanya disampaikan oleh Solidaritas Hakim Indonesia. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial juga menyampaikan kondisi kesejahteraan hakim di Indonesia. MA dan KY memberikan prakiraan hitungan gaji hingga tunjangan para hakim saat ini. Hal-hal itulah yang menjadi dasar tim ekonomi Prabowo Subianto melakukan realokasi anggaran untuk salah satunya memenuhi tuntutan para hakim.

Tak hanya itu, ia berkomitmen segera mengesahkan RUU Jabatan Hakim pada periode DPR RI 2024-2029 ini. Dengan begitu, Pimpinan DPR RI Korpolkam itu berharap tugas hakim dalam memenuhi kebutuhan keadilan bagi rakyat tidak terhambat.

"Insyaallah kami semua sudah sama-sama sepakat, ada beberapa hal yang kita akan perbaiki termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru saat ini, untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim. Tentunya kami berharap agar tugas-tugas hakim dalam memenuhi kebutuhan rakyat akan keadilan tidak terhambat," tutup Dasco. **pun/mh**

Optimisme dan Tantangan Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pemerintah telah mematok target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% untuk tahun 2025. Target ini dinilai optimistis, namun para anggota DPR RI mengingatkan bahwa untuk mencapainya, pemerintah perlu menghadapi berbagai tantangan besar.

FOTO: FARHAN/VIEL

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad.

Tantangan-tantangan ini mencakup stabilitas fiskal, daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, serta ketidakpastian kondisi ekonomi global. "Target ini bisa dicapai, namun perlu strategi yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Kita tidak hanya harus menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, tetapi juga harus siap menghadapi dinamika global yang masih penuh ketidakpastian," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad.

Proses Perancangan

Dalam proses penyusunan APBN 2025, DPR RI dan pemerintah melalui berbagai rapat kerja telah menetapkan asumsi dasar yang akan menjadi pijakan bagi pembangunan ekonomi nasional ke depan. Badan Anggaran DPR RI, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyepakati sejumlah asumsi penting, termasuk tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan harga minyak dunia.

Meski demikian, Kamrussamad mengingatkan bahwa rancangan APBN 2025 harus diwarnai oleh semangat keberlanjutan. "APBN 2025 harus mampu menjadi pijakan awal bagi pemerintahan baru, tetapi juga harus realistis dalam merespons dinamika perekonomian global. Tantangan kita ada di mana-mana,

FOTO: MUNCHEN/VEL

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.

mulai dari ketidakpastian pasar global hingga potensi krisis energi dan pangan," tegasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, Puteri Komarudin, menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah harus fokus memperkuat daya beli masyarakat. Ini bukan hanya soal pengeluaran, tetapi bagaimana memastikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa terganggu oleh inflasi yang mungkin terjadi," jelas Puteri.

Target Ambisius 8%

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih ambisius, yakni mencapai 8 persen dalam lima tahun ke depan. Kebijakan yang dikenal dengan istilah "Prabowonomics" ini berfokus pada industrialisasi, investasi besar-besaran, serta transformasi digital untuk mendukung akselerasi ekonomi.

"Indonesia punya potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Dengan kebijakan yang tepat, kita optimistis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%," kata Presiden Prabowo dalam salah satu pidatonya yang disambut antusias oleh berbagai kalangan.

Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, menilai bahwa target 8 persen tersebut perlu dicapai secara bertahap dengan melihat *baseline* atau kondisi ekonomi yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. "Kita harus realistis. Memang, target 8 persen ini sangat ambisius, tapi har us diperhitungkan dengan kondisi awal yang kita hadapi. Apa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya harus menjadi landasan kuat untuk melangkah," jelasnya.

FOTO: FARHAN/VEL

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.

Komitmen & Pengawalan

DPR RI, sebagai lembaga legislatif yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan keuangan negara, berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan APBN dan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya. Terutama dengan terpilihnya pimpinan baru di Komisi XI yang memiliki tugas khusus dalam mengawal sektor keuangan, DPR RI akan semakin fokus pada pengawasan fiskal dan penguatan ekonomi masyarakat.

"Akses modal bagi UMKM dan digitalisasi sektor-sektor ekonomi menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. DPR akan terus memberikan masukan dan mengawal kebijakan yang pro-rakyat agar target pertumbuhan ini tercapai," ungkap Kamrussamad.

Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPR RI, serta dukungan kebijakan yang tepat, diharapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2025 dapat dicapai. Meskipun tantangan masih membayangi, komitmen DPR RI dalam mengawal kebijakan ekonomi menjadi kunci penting untuk membawa Indonesia menuju masa depan ekonomi yang lebih cerah.

aha/mh

Revisi UU Paten

Mendorong Inovasi dan Kepastian Hukum

DPR RI telah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pada rapat paripurna, 30 September 2024.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Paten, Wihadi Wiyanto, menyatakan bahwa revisi ini diperlukan lantaran UU yang ada dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan hukum internasional. "Perubahan dilakukan terhadap 48 pasal yang terdapat dalam UU No.13/2016 tentang Paten," ungkap Wihadi di Jakarta dalam laporannya di Sidang Paripurna (30/9) silam.

Terdapat tiga hal utama yang ditekankan dalam UU Paten terbaru, yaitu mendorong inovasi nasional, mengharmonisasikan dengan ketentuan internasional, dan meningkatkan pelayanan paten. Untuk mendorong inovasi nasional, maka invensi yang diimplementasikan pada komputer, pengaturannya dikelompokkan ke dalam kategori sistem, metode, dan penggunaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis 4.0 dan 5.0.

"Invensi juga mencakup penggunaan baru atau temuan (discovery) untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi obat tradisional. Grace Period atas publikasi ilmiah suatu paten, diperpanjang dari 6 bulan menjadi 12 bulan untuk memberikan kesempatan kepada Inventor di Indonesia dapat mendaftarkan paten" jelas Wihadi.

FOTO: DEP/VEL

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Paten, Wihadi Wiyanto.

Lebih lanjut Wihadi yang juga Ketua Badan Legislasi pada periode lalu, menjelaskan upaya pengharmonisasian dengan ketentuan paten internasional. Pemegang paten membuat pernyataan pelaksanaan paten di Indonesia dan memberitahukannya kepada menteri paling lambat setiap akhir tahun.

Selain itu, perubahan UU Paten ini bertujuan meningkatkan pelayanan paten, terutama terkait sumber daya genetik. Pemohon hanya perlu menyertakan surat pernyataan asal sumber daya tersebut jika invensi berkaitan dengan hal itu.

Dalam kesempatan yang berbeda, Wihadi sempat mengatakan bahwa pencantuman sumber daya genetik dalam undang-undang salah satu yang diharapkan sejak lama. Pada Juli 2024 lalu, Menteri Hukum dan HAM RI telah menandatangani Traktat Internasional tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional atau World Intellectual Property Organization (WIPO) Treaty on Genetic Resources, Traditional Knowledge (GRTK).

Hal ini kemudian tidak disia-siakan dan dijadikan momentum untuk segera memasukan sumber daya genetik sebagai penambahan dalam UU Paten yang saat itu tengah dibahas oleh Panitia Khusus. Adapun WIPO sendiri adalah Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia.

"Saat menyusun RUU ini, telah banyak juga sumber-sumber daya kita yang secara genetik bisa dipakai untuk dipatenkan. Tetapi, hingga saat ini baru sekarang diratifikasi di WIPO sehingga kita juga langsung masukkan dalam undang-undang kita. Jadi, memudahkan itu untuk dilakukan pematenan pada masalah itu," ujar Wihadi saat ditemui Parlementaria pada pembahasan tingkat I UU Paten di DPR RI, Senayan, Jakarta, pertengahan September lalu.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan bahwa perubahan UU Paten merupakan upaya untuk mendorong percepatan proses pendaftaran bagi mereka yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Selain itu, UU Paten juga disinyalir akan memberikan kepastian bagi pada pemegang paten. "UU Paten ini kita dorong untuk waktu pendaftarannya yang lebih singkat dan juga mereka mendapatkan kepastian paten itu," tambahnya.

Anggota Panitia Khusus RUU Paten, Subardi juga ikut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa revisi aturan paten yang baru akan mempercepat dan mempermudah

FOTO: JAKA/VEL

Anggota Panitia Khusus RUU Paten, Subardi..

layanan pendaftaran, terutama di bidang farmasi dan kesehatan. RUU ini dirancang untuk menjawab kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual.

Dari sisi aturan pembentukan undang-undang, harmonisasi antara RUU Paten dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum untuk percepatan investasi. Subardi juga menilai RUU Paten merupakan langkah strategis Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika global.

"Perubahan aturan ini untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global yang menuntut inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi," katanya. Ekosistem paten juga harus semakin baik, meliputi perlindungan kekayaan intelektual, penguatan daya saing industri dalam negeri, dan penemuan berbasis pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik.

Ekosistem ini yang akan menarik investasi dari luar negeri pada bidang penelitian dan pengembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, dalam agenda pembicaraan Tingkat II RUU Paten pada Rapat Paripurna, September silam, menambahkan bahwa tujuan RUU ini untuk menciptakan perlindungan dan pelayanan paten yang inovatif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebelumnya telah dilakukan beberapa kali melalui UU Cipta Kerja. Revisi UU Paten yang terbaru merupakan RUU inisiatif pemerintah yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas (Prolegnas Prioritas) Tahun 2024. Adapun rangkaian pembahasan RUU ini telah dimulai sejak penetapan anggota pansus dalam Rapat Paripurna, 28 Maret 2024 lalu.

uc/mh

Penetapan penetapan Pimpinan DPR RI Periode 2024-2029. Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), DPR RI juga dipimpin oleh 4 (empat) Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 di antaranya Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Saan Mustofa dari Fraksi Partai NasDem, dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB. dalam agenda Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 masa keanggotaan DPR RI 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). FOTO: TIM/ANDRI

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menetapkan pimpinan Komisi I DPR RI periode 2024-2029, Utut Adianto sebagai Ketua Komisi I dari Fraksi PDI-P, Dave Akbarshah sebagai Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Golkar, Ahmad Heryawan sebagai Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai PKS, Budi Satrio sebagai Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Gerindra, dan Anton Sukartono Suratto sebagai Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Demokrat dalam rapat perdana Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO : RUNI/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad S.H., M.H., menetapkan Pimpinan Komisi II DPR RI periode 2024 - 2029. Pimpinan Komisi II DPR RI yang ditetapkan di antaranya M Rifqinizamy Karyasuda sebagai Ketua Komisi II DPR RI dari F - P Nasdem, Aria Bima sebagai Wakil Ketua dari F - PDIP, Zulfikar Arse Sadikin sebagai Wakil Ketua dari F - P Golkar, Bahtra Banong sebagai Wakil Ketua dari F - P Gerindra dan Dede Yusuf sebagai Wakil Ketua dari F - P Demokrat di ruang rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Selasa (22/10/2024). FOTO : MARIO/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad S.H., M.H., menetapkan Pimpinan Komisi III DPR RI periode 2024 - 2029, Pimpinan Komisi III DPR RI yang ditetapkan di antaranya Habiburokhman sebagai Ketua Komisi III DPR RI dari F - P Gerindra, Dede Indra Permana Soedirо sebagai Wakil Ketua dari F - PDIP, Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua dari F - P Golkar, Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua dari F - P Nasdem dan Rano Alfath sebagai Wakil Ketua dari F - PKB. di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Senayan Jakarta.Selasa (22/10/2024). FOTO : TARI/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa secara resmi menetapkan susunan pimpinan Komisi VI DPR RI untuk periode 2024-2029. Ketua Komisi IV DPR RI yaitu Siti Hediati Soeharto (Fraksi Partai Gerindra), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman (Fraksi PDI-Perjuangan), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto (Fraksi Partai Golkar), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan (Fraksi PAN) dan Abdul Kharis Almasyhari (Fraksi PKS). di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO : RUNI/ANDRI

Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi menetapkan susunan pimpinan Komisi VI DPR RI untuk periode 2024-2029. Ketua Komisi V DPR RI terpilih Lasarus (Fraksi PDI-Perjuangan), Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae (Fraksi Partai Golkar), Andi Iwan Darmawan Aras (Fraksi Partai Gerindra), Roberth Rouw (Fraksi Partai NasDem) dan Syaiful Huda (Fraksi PKB). di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO : RUNI/ANDRI

Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi menetapkan susunan pimpinan Komisi VI DPR RI untuk periode 2024-2029. Sebagai Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dan Wakilnya Adisatrya Suryo Sulisto (F-PDI Perjuangan), Nurdin Halid (F-Partai Golkar), Andre Rosiade (F-Partai Gerindra) dan Eko Hendro Punomo (F-PAN) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO : OJI/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa secara resmi menetapkan susunan pimpinan Komisi VII DPR RI untuk periode 2024-2029. Sebagai Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay (Fraksi PAN) dan Wakil-Wakilnya Evita Nursanty (Fraksi PDI Perjuangan), Lamhot Sinaga (Fraksi Partai Golkar), Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra) dan Chusnunia Chalim (Fraksi PKB) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO : OJI/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menetapkan pimpinan Komisi VIII DPR RI periode 2024-2029. Adapun pimpinan tersebut yakni Marwan Dasopang sebagai Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKB, Abidin Fikri sebagai Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PDI-Perjuangan, Singgih Januartmoko sebagai Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, Ansory Siregar sebagai Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKS, dan Abdul Wachid sebagai Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Gerindra. di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO: KRESNO/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menetapkan pimpinan Komisi IX DPR RI periode 2024-2029. Adapun pimpinan tersebut yakni Felly Estelita Runtuwene sebagai Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, didampingi Wakil Ketua Charles Honoris (Fraksi PDI-Perjuangan), Yahya Zaini (Fraksi Partai Golkar), Putih Sari (Fraksi Partai Gerindra) dan Nihayatul Wafiroh (Fraksi PKB). di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO: MUNCHEN/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menetapkan pimpinan Komisi X DPR RI periode 2024-2029. Adapun pimpinan tersebut yakni Hetifah Sjaifudian sebagai Ketua Komisi X dari Fraksi Golkar, My Esti Wijayati sebagai Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PDI-Perjuangan, Himmatul Aliyah sebagai Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra, Lalu Hadrian Irfani sebagai Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PKB, dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PKS. di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO: MUNCHEN/ANDRI

Wakil Ketua DPR Adies Kadir saat menetapkan jajaran ketua dan wakil ketua pada Komisi XI DPR periode 2024-2029, Mukhamad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Sementara itu, wakil ketua Komisi XI periode 2024-2029 ditempati Dolfie OFP selaku perwakilan dari Fraksi PDIP, Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerindra, Fauzi Amro dari Fraksi Partai Nasdem, dan M Hanif Dhakiri dari Fraksi PKB di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO : MUNCHEN DAN MARIO/ANDRI

Wakil Ketua DPR Adies Kadir saat menetapkan jajaran ketua dan wakil ketua Komisi XII DPR RI periode 2024-2029, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya (F-Partai Golkar), Wakil Ketua Komisi XII Dony Maryadi Oekon (F-PDI-Perjuangan), Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi (F-Partai Gerindra), Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto (F-Partai NasDem) dan Wakil Ketua Putri Zulkifli Hasan (F-PAN) di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). FOTO : TARI/ANDRI.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, menetapkan pimpinan Komisi XIII DPR RI periode 2024-2029, Willy Aditya dari Fraksi Partai NasDem sebagai Ketua Komisi XIII DPR RI, serta ke empat Wakil Ketua Komisi XIII yakni Andreas Hugo Pariera dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar, Rinto Subekti dari Fraksi Partai Demokrat, serta Sugiat Santoso dari Fraksi Partai Gerindra. di ruang rapat Badan Anggaran, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). FOTO: MENTARI/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad S.H., M.H., menetapkan Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2024 - 2029, Pimpinan Baleg DPR RI yang ditetapkan di antaranya Bob Hasan sebagai Ketua Baleg DPR RI dari F - P Gerindra, Sturman Panjaitan sebagai Wakil Ketua dari F - PDIP, Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Wakil Ketua dari F - P Golkar, Martin Manurung sebagai Wakil Ketua dari F - P Nasdem dan A Iman Sukri sebagai Wakil Ketua dari F - PKB di ruang rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I Senayan Jakarta Selasa (22/10/2024). Foto : Yoga/Andri

Ketua DPR Puan Maharani usai menetapkan Pimpinan Banggar DPR RI periode 2024â€"2029 Ketua Banggar Said Abdullah (Fraksi PDIP), Wakil Ketua Banggar Wihadi Wiyanto (Fraksi Gerindra), Wakil Ketua Banggar Muhidin M Said (Fraksi Golkar), Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid (Fraksi PKB) dan Wakil Ketua Banggar Syarief Alkadrie (Fraksi NasDem) di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO: KRESNO/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad S.H., M.H., menetapkan Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2024 - 2029, Mardani Ali Sera sebagai Ketua Baleg DPR RI dari F - PKS, Irine Yusiana Roba Putri sebagai Wakil Ketua dari F - PDIP, Ravindra Airlangga sebagai Wakil Ketua dari F - P Golkar, M Husein Fadlulloh sebagai Wakil Ketua dari F - P Gerindra dan Bramantyo Suwondo sebagai Wakil Ketua dari F - P Demokrat di ruang rapat BKSAP, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Selasa (22/10/2024). FOTO : PRIMA/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Masyarakat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal secara resmi menetapkan susunan pimpinan BURT DPR RI untuk periode 2024-2029. Ketua BURT DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, juga menetapkan empat Wakil Ketua BURT lainnya, yakni Indah Kurnia dari Fraksi PDI-Perjuangan, Ilham Pangestu dari Fraksi Partai Golkar, Novita Wijayanti dari Fraksi Partai Gerindra, dan Desy Ratnasari dari Fraksi PAN. di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO : RUNI/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, menetapkan pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk masa keanggotaan 2024-2029, Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua BAKN, didampingi oleh empat wakil ketua, yaitu Andi Achmad Dara (Fraksi Partai Golkar), Endipat Wijaya (Fraksi Partai Gerindra), Habib Idrus Salim Aljufri (Fraksi PKS), dan Herman Khaeron (Fraksi Partai Demokrat) di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO: MENTARI/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal menetapkan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI periode 2024-2029, Nazaruddin Dek Gam dari Fraksi PAN sebagai Ketua MKD DPR; Hasanuddin dari Fraksi PDI-Perjuangan sebagai Wakil Ketua MKD DPR; Agung Widyantoro sebagai Fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua MKD DPR; Imron Amin dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua MKD DPR; dan Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari Fraksi PKS sebagai Wakil Ketua MKD DPR di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO: KRESNO/ANDRI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa secara resmi menetapkan susunan pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI untuk periode 2024-2029. Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani (F-PKS), Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu (F-PDI - Perjuangan), Agun Gunanjar Sudarsa (F-Golkar), Taufiq Abdullah (F-PKB), dan Cellica Nurrachadiana (F-Demokrat). di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO : RUNI/ANDRI

DPR Kawal Janji Presiden di Hadapan Rakyat Indonesia

NARASI : JAKA NUGRAHA • FOTO : TIM FOTOGRAFER

Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2024-2029 berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen. Agenda tersebut dihadiri oleh 709 dari 731 anggota MPR, yang dinyatakan kuorum sesuai tata tertib.

Usai dilantik, Prabowo Subianto di hadapan rakyat Indonesia menyatakan lima janji perbaikan bidang ekonomi. Janji-janji yang berupaya diwujudkan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu di antaranya, menghilangkan kemiskinan. Kemudian, swasembada pangan hingga swasembada energi.

Anggota DPR Kamrussamad menekankan bahwa DPR akan terus berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. "Fungsi pengawasan DPR bukan hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam mencapai visi besar mereka," ungkapnya. **dev/mh**

Netty Prasetiyani adalah sosok yang tak asing dalam dunia politik Indonesia. Sebagai anggota DPR, ia telah mengukir namanya melalui dedikasi dan kerja keras dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Wanita 48 tahun ini, dikenal sebagai anggota dewan yang peduli terhadap isu-isu sosial, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Netty Prasetyani

JEMBATAN ASPIRASI RAKYAT DI DPR

Masa kecil, bagi Netty menyimpan sejuta kenangan berharga. Tak hanya sekadar ingatan, masa kecil dianggapnya sebagai cerminan perjalanan hidup yang penuh warna. Netty lahir dan dibesarkan di Komplek Auri Halim Perdana Kusuma, sebuah lingkungan yang penuh dengan kehangatan dan kenangan. "Masa kecil saya itu sangat berwarna," ungkapnya, menekankan betapa berartinya pengalaman-pengalaman yang ia jalani.

Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat mendukung pendidikan, dengan seorang ibu yang berprofesi sebagai guru dan ayah yang seorang prajurit. Kombinasi kedua profesi ini memberikan pengaruh besar dalam pola pengasuhan yang ia terima. Kedua orangtua Netty adalah sosok yang kuat dan disiplin. Sang ibu, seorang guru kelas 1 SD, dikenal sebagai sosok yang sabar dalam mengajar.

Sementara sang ayah kerap menerapkan disiplin yang ketat, hasil dari pengalaman hidup yang keras. "Pokoknya, kamu harus berprestasi," adalah pesan yang selalu diulang-ulang oleh sang ayah. Meskipun tuntutan akademis tinggi, masa kecil Netty tidak hanya dipenuhi dengan belajar. Ia juga menikmati kebahagiaan sederhana yang ditawarkan oleh lingkungan sekitar. "Setelah pulang sekolah, kita bisa melihat Pak Tani membajak sawah dan membawa kerbau," kenangnya dengan senyuman.

Lingkungan Halim yang dikelilingi sawah memberi kesempatan bagi Netty dan teman-temannya bermain dan belajar dari alam. Ia ingat bagaimana mereka berlari ke sawah, memanjat pohon kersen,

dan menikmati buah-buahan segar dari pohon-pohon di sekitar rumah. Pengalaman-pengalaman ini tidak hanya memberikan keceriaan, tetapi juga membentuk karakter dan motivasi dalam diri Netty. Terbukti, saat sekolah dasar (SD), ia berhasil menjadi salah satu siswa terbaik dengan nilai EBTANAS tertinggi di SD Angkasa Halim.

Tak hanya itu, saat kelas 3 SD, wanita yang lahir pada 15 Oktober **1969** ini juga terpilih menjadi salah satu perwakilan di sekolah untuk mengikuti latihan vokal bersama Joko Sutrisno. Meski tidak menjadi hobinya, nyatanya Netty masih memiliki bakat bernyanyi hingga saat ini. "Kalau dikasih tantangan, saya masih bisa nyanyi sih," katanya sambil tersenyum.

Menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta, Netty-pun melanjutkan studi di Universitas Indonesia dan meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial. Selama masa kuliah, ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Pengalamannya di organisasi tersebut membentuk karakter dan kepemimpinannya yang kuat.

Bersama keluarga tercinta.

Mendampingi Sang Suami untuk Jawa Barat

Kisah Netty Prasetiyani adalah sebuah perjalanan inspiratif yang mencerminkan dukungan dan komitmen dalam keluarga saat suaminya, Ahmad Heryawan, atau yang akrab disapa Kang Aher, menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sejak awal masa kepemimpinan pada tahun 2008, Netty telah berperan aktif mendampingi suaminya, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka.

Netty menceritakan pentingnya konsolidasi di dalam keluarga setelah Kang Aher dinyatakan menang dalam pemilihan gubernur. "Kang Aher meminta agar saya membantu menjalankan amanah ini tanpa terlibat dalam 'politik dapur' atau 'politik kasur'," ungkapnya. Ia menyadari bahwa peran istri seringkali dijadikan pintu masuk untuk kepentingan politik, sehingga ia bertekad untuk menjaga integritas keluarga dan menjaga fokus pada kebaikan untuk masyarakat Jawa Barat.

Karena keluarga menjadi inti dari konsolidasi ini, Netty mengajak anak-anak mereka untuk terlibat dalam misi mulia tersebut. "Anak saya yang paling besar waktu itu masih di kelas 2 SMA, dan kami sudah menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan disiplin sejak kecil," ujarnya. Ketika anak-anaknya bertanya bagaimana cara membantu, Netty menekankan pentingnya belajar dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di sekolah. Anak-anak mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa ayah mereka memiliki tanggung jawab besar sebagai gubernur.

Selama dua periode kepemimpinan Kang Aher, dari 2008 hingga 2018, Netty terus mendukung suaminya dalam berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat. Dia memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh suaminya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Anak-anak kami sangat terlibat dan memantau setiap langkah yang diambil oleh ayah mereka," ujar Netty. Ia menceritakan bagaimana mereka mengikuti berita dan selalu siap memberikan dukungan moral bagi Kang Aher, serta mengingatkan betapa pentingnya menjaga reputasi dan integritas sebagai pejabat publik.

Dalam menjalani kehidupan sebagai pendamping gubernur, Netty selalu menekankan pada Kang Aher untuk tidak mengabaikan masa depan keluarga. "Saya selalu bilang, jangan sampai ada masa depan yang suram bagi kami," tegasnya. Pesan ini menjadi pengingat bagi Kang Aher untuk tetap bersih dari praktik korupsi dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Dengan dedikasi yang tinggi dan nilai-nilai yang kuat, Netty Prasetiyani telah menunjukkan bahwa peran seorang istri di balik kesuksesan suami di dunia politik sangatlah penting. Ia bukan hanya pendukung, tetapi juga pendorong yang menginspirasi Kang Aher untuk menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab.

Ibu yang Baik bagi Keenam Anaknya

Kisah Netty Prasetiyani sebagai seorang ibu tidak hanya mencerminkan cinta dan perhatian, tetapi juga komitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bersama suaminya, Kang Aher, ia menerapkan pendekatan unik dalam mendidik anak, yang menggabungkan otoritas, demokrasi, dan edukasi.

Netty mengungkapkan bagaimana diskusi tentang pendidikan anak sudah dimulai sejak awal pernikahan mereka. "Kang Aher selalu memberi briefing mengenai tema-tema penting, termasuk bagaimana cara mendidik anak," jelasnya. Mereka sepakat untuk menggunakan tiga pendekatan dalam mendidik: otoritas, demokratis, dan edukatif.

Misalnya, saat anak sulung mereka memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, perdebatan pun terjadi. "Anak saya protes saat kami menginginkannya memilih jurusan IPA," ungkap Netty. Dia menjelaskan bagaimana anaknya mempertahankan argumennya untuk memilih jurusan IPS karena merasa bahwa jurusan tersebut lebih strategis untuk membentuk kebijakan. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Netty dan Kang Aher memberikan ruang bagi anak-anak untuk berargumen dan mengemukakan pendapat.

Sosok ibu dari enam anak ini juga memastikan bahwa teknologi digunakan secara positif dengan menempatkan PC di ruang keluarga, bukan di dalam kamar. Ini menciptakan suasana belajar yang terbuka dan memudahkan pengawasan. "Kami menetapkan regulasi, termasuk waktu untuk menonton televisi, untuk membimbing mereka dalam menggunakan media," tambahnya.

Bentuk pengawasan dan komunikasi yang baik inilah yang membuat anak-anak merasa nyaman untuk berbagi. Netty-pun menekankan pentingnya dialog dalam keluarga. "Seringkali orang tua melarang tanpa menjelaskan alasannya. Kami ingin anak-anak mengerti kenapa sesuatu itu dilarang," katanya.

Mengisi Waktu Luang dengan Berolahraga

Di balik kesibukan dan tanggung jawabnya sebagai seorang Anggota DPR, Netty Prasetiyani menemukan waktu untuk menikmati hobinya yang penuh semangat: olahraga.

> **"Diskusi tentang pendidikan anak sudah dimulai sejak awal pernikahan mereka. "Kang Aher selalu memberi briefing mengenai tema-tema penting, termasuk bagaimana cara mendidik anak"**

Netty menceritakan bahwa dia mulai berolahraga sejak kecil. "Dulu kami punya halaman rumah yang luas, ada meja pingpong dan lapangan bulu tangkis," ujarnya. Salah satu momen penting dalam perjalanan olahraganya adalah ketika ia memutuskan untuk belajar renang.

"Dulu, saat sekolah, saya tidak memanfaatkan pelajaran renang dengan baik. Saya hanya 'luncur' saat giliran nilai," ungkapnya dengan tawa. Namun, setelah berbincang dengan teman-teman kalangan TNI yang aktif dalam penanggulangan bencana,

Netty merasa terdorong untuk menguasai keterampilan penting ini. "Mereka bilang, 'Ibu harus bisa renang, minimal untuk menolong diri sendiri,'" katanya.

Akhirnya, wanita berkacamata ini, mengambil kursus renang dan dilatih seorang atlet renang dari Jawa Barat. "Sejak itu, saya rutin renang di kolam publik. Teman-teman lansia di sana sering memberi semangat. Mereka selalu bilang, 'Mulailah dari muda!'" Kenyataan bahwa olahraga bisa menjadi aktivitas sosial yang menyenangkan semakin membuatnya bersemangat.

Selain renang, Netty juga menyukai voli, meskipun ia menyadari bahwa olahraga ini memiliki dampak tinggi pada tubuh. "Dulu di SMA, saya aktif di ekstrakurikuler voli dan ekstrakurikuler pecinta alam," ceritanya. Kegiatan petualangan seperti camping dan climbing membantunya mengembangkan rasa cinta terhadap alam. Dia pun aktif dalam Palang Merah Remaja (PMR), berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mempertemukan anak-anak muda dengan kegiatan sosial dan lingkungan.

Perjalanan Menjadi Wakil Rakyat

Kisah Netty Prasetiyani sebagai anggota DPR RI adalah perjalanan yang penuh makna dan dedikasi. Mengambil langkah baru setelah suaminya, Kang Aher, menyelesaikan

Bersama suami tercinta

Netty (tengah) saat dilantik menjadi Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).

masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Netty merasa siap untuk melanjutkan pengabdian di bidang legislatif.

"Bagi saya, tugas ini bukanlah privilege, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan baik," ujar Netty. Ia diamanahi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengisi kursi di daerah pemilihan Jawa Barat VIII, yang meliputi Cirebon dan Indramayu. Tugas ini datang setelah sang suami menyelesaikan dua periode sebagai gubernur, dan Netty merasa penting untuk merawat dan melanjutkan kerja yang telah dimulai.

Selama sepuluh tahun mendampingi Kang Aher, wanita yang lahir di Jakarta ini, banyak terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan sosial, yang membantunya memahami tantangan yang dihadapi masyarakat. "Kultur di PKS adalah kami tidak meminta jabatan. Ketika ditugaskan, ya kita terima dan berusaha sebaik mungkin," tuturnya.

Dengan dukungan penuh dari keluarga terutama suami tercinta, Netty pun mulai merancang strateginya untuk meraih suara. Ia menyadari bahwa kunci keberhasilan terletak pada menjalin komunikasi yang baik dengan pemilih. "Kita harus sebanyak mungkin bertemu dengan mereka. Dengan menggunakan struktur tim dan relawan, kami berupaya mendatangi semua yang bisa membantu," jelasnya.

Menariknya, keberadaan Netty sebagai seorang perempuan di DPR menarik perhatian banyak orang. "Banyak yang penasaran, perempuan bisa apa sih di DPR?" Ini menjadi peluang bagi Netty untuk menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam legislatif. Meskipun tantangan bahasa lokal dan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi cukup besar, Netty tak patah semangat. Ia menggunakan pendekatan lokal untuk lebih mudah menjangkau pemilih.

"Masyarakat masih banyak yang menghadapi masalah, dan itu adalah pekerjaan rumah besar bagi kita semua," tegas Netty. Meskipun baru menjalani masa jabatan, ia sudah merasa penting untuk terus berkontribusi dan mencari solusi bagi masyarakat. Netty mengakui bahwa menjalani tugas di DPR sangat berbeda dengan ketika ia mengabdi di eksekutif.

Mengemban Amanat Jadi Ketua BAM

Sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di DPR RI, Netty mengemban tugas penting untuk menjembatani suara rakyat dengan kebijakan legislatif. Dalam posisinya itu, Netty bertekad menjadikan DPR sebagai "rumah besar" bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.

"Badan Aspirasi Masyarakat harus menjadi saluran yang efektif agar semua kelompok masyarakat, termasuk organisasi profesi, dapat didengar dan diperjuangkan," ungkap Netty. Dalam prosesnya, ia dan timnya tengah melakukan penelaahan mendalam terhadap tugas dan fungsi badan ini.

Di tengah upaya memperjelas peran BAM, Netty mengingatkan pentingnya tidak tumpang tindih dengan tugas alat kelengkapan dewan (AKD). "Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang ditampung dapat diolah dengan baik dan tidak mengganggu proses yang sudah ada di komisi," tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmennya menciptakan sinergi antara berbagai elemen di DPR.

Salah satu ide menarik yang diusulkan Netty adalah membuka saluran petisi dari masyarakat, mirip dengan praktik yang diterapkan di negara lain. "Kita bisa memfasilitasi masyarakat yang ingin mengajukan petisi, dan langsung menyalurkan aspirasi mereka ke AKD yang relevan," ujarnya. Hal ini diharapkan, dapat mempercepat proses pengajuan aspirasi dan membuatnya lebih transparan. Dengan semangat tersebut, Netty berharap dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap DPR. **bia/mh**

Mengapresiasi Kesiapan Pengamanan Pilkada di Jawa Tengah dan DIY

Pilkada serentak yang dihelat November 2024 ini, membutuhkan perhatian keamanan dari Polri dan TNI. Pilkada digelar secara bersamaan di semua daerah di Indonesia. Keamanan jadi sektor krusial untuk kesuksesan pemilihan para kepala daerah.

FOTO: BUNGA/VEL

Wakil Ketua Komisi I, Utut Adianto (kelima dari kanan), saat kunjungan kerja spesifik ke Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah.

Komisi I DPR RI berkepentingan mengawasi peran TNI dalam menjaga keamanan Pilkada Serentak 2024. Saat kunjungan kerja ke Kodam IV/Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, isu keamanan jadi topik pembicaraan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, menilai, kesiapan Kodam IV/Diponegoro untuk mengamankan Pilkada Serentak sudah sangat baik. "Kesiapan ini terlihat dari koordinasi yang matang antara TNI dan berbagai pemangku kepentingan daerah," ujar Utut, Jumat (20/09/2024) silam.

Utut menambahkan, Kodam IV/Diponegoro telah mempersiapkan personel serta strategi pengamanan yang efektif untuk menjamin keamanan selama Pilkada. "Kami optimis TNI siap mengawal jalannya pesta demokrasi ini dengan aman dan lancar," tambah Utut.

Selain itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti pentingnya kesejahteraan prajurit TNI yang bertugas di lapangan, termasuk logistik dan

FOTO: RUNI/VEL

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (ketiga dari kiri) saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Solo, Jawa Tengah.

> **Kami berikan apresiasi kepada Kepala Binda yang sudah mampu menjaga kondisi kondusif jelang Pilkada**
>
> **Abdul Kharis Almasyhari**
> **Wakil Ketua Komisi I DPR RI**

dukungan sarana. "Prajurit perlu dukungan logistik yang baik agar bisa menjalankan tugas dengan maksimal," tegasnya.

Di sisi lain, Komisi I juga mengapresiasi kesiapan Badan Intelijen Daerah (Binda) di Jawa Tengah dan DIY. Dalam kunjungan ke Binda Jateng, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memuji kinerja Kepala Binda Jateng Brigjen Pol. Harseno, yang baru bertugas selama satu setengah bulan. "Kami berikan apresiasi kepada Kepala Binda yang sudah mampu menjaga kondisi kondusif jelang Pilkada," ujar Kharis di Solo, Jumat (14/09/2024) lalu.

Legislator dapil Jawa Tengah V ini berterima kasih atas kekompakan tim Binda Jateng. Menurutnya, meskipun Jawa Tengah dikenal sebagai provinsi yang dinamis, tim Binda telah mampu berbaur dengan masyarakat, sehingga segala bentuk antisipasi sudah disiapkan dengan baik. "Kerja keras dan kekompakan tim Binda Jateng patut diapresiasi karena mereka sudah mampu mempersiapkan segala kemungkinan," lanjutnya.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Binda DIY, Ketua Tim Kunjungan Sturman Panjaitan, mengungkapkan bahwa di era digital ini, ancaman terhadap demokrasi kita semakin kompleks. Terlebih, hoaks dan disinformasi menyebar dengan cepat melalui media sosial dan berpotensi memecah belah masyarakat maupun mengancam integritas proses Pilkada.

"Dengan populasi mahasiswa yang besar dan keragaman latar belakang penduduknya, Yogyakarta menjadi cerminan mini Indonesia yang harus kita jaga bersama," lanjut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Di akhir, ia mengungkapkan bahwa hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi masukan komisi I DPR RI dalam merumuskan kebijakan mendatang. "Terkait bidang intelijen melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan," tutupnya. **hal, rni, blf/mh**

FOTO: HIRA/VEL

Ketua Tim Kunker Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke BIN Daerah (Binda) Provinsi DIY di Yogyakarta.

FOTO: OJI/VEL

Ketua Tim Kunsfik Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat melakukan pertemuan di Kantor Bupati Bekasi.

Menyoroti Persiapan Pilkada dan Pertanahan

Isu Pilkada dan pertanahan selalu jadi sorotan Komisi II DPR RI. Kedua isu ini menjadi penting jelang pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia.

Di Bekasi, Jawa Barat, delegasi Komisi II mengapresiasi kesiapan Pilkada 2024. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa Kabupaten Bekasi telah menunjukkan persiapan yang matang dalam pertemuan dengan Pemkab Bekasi, KPU, Bawaslu, serta perwakilan Kemendagri dan KPU Pusat di Gedung Bupati Bekasi.

"Secara keseluruhan, kami menyimpulkan bahwa Kabupaten Bekasi beserta para pemangku kepentingan telah mempersiapkan Pilkada 2024 dengan baik. Kolaborasi yang solid antara Pemkab, KPU, dan Bawaslu diyakini akan membuat proses Pilkada berjalan lancar, damai, dan kondusif," ungkap Saan September silam.

Dalam kunjungan tersebut, Saan menekankan, semua parameter yang ditanyakan, termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), pembiayaan, dan peta kerawanan Pilkada, telah dipenuhi oleh pihak terkait.

Ia menilai persiapan di Kabupaten Bekasi sudah cukup matang, baik dari sisi logistik maupun antisipasi pelanggaran. DPT Pilkada Kabupaten Bekasi tercatat 2.251.856 dengan tiga

> **kami menyimpulkan bahwa Kabupaten Bekasi beserta para pemangku kepentingan telah mempersiapkan Pilkada 2024 dengan baik.**
>
> **Saan Mustopa**
> **Wakil Ketua Komisi II DPR RI**

pasangan calon yang akan ditetapkan pada 22 September lalu.

Isu Pertanahan

Anggota Komisi II DPR RI Qumi Husnuniyati memberikan perhatian pada isu pertanahan di Jawa Timur, terutama terkait tanah oloran di Kabupaten Lumajang. Qumi mengungkapkan, kekhawatiran masyarakat pesisir selatan atas penguasaan tanah oleh investor asing. "Khususnya untuk Kecamatan Tempeh, Desa Pandanarum dan Desa Pandanwangi," ungkap Qumi.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Wilayah Pertanahan di Surabaya, Qumi menyampaikan bahwa kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jawa Timur telah melampaui target, terutama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ia berharap BPN dapat mengawal kepentingan masyarakat dan menjaga kearifan lokal agar tanah pesisir tidak jatuh ke tangan investor asing.

"Harapan masyarakat adalah agar tanah pesisir bisa terjaga. Kami berharap BPN provinsi dan Kabupaten Lumajang dapat menangani persoalan pertanahan ini secara serius," tegasnya. Dengan serangkaian kunjungan kerja ini, Komisi II DPR RI berharap semua persiapan dan isu Pilkada dan pertanahan dapat ditangani dengan baik demi kepentingan masyarakat.

aas,oji/mh

FOTO: ANJU/VEL

Anggota Komisi II DPR RI Qumi Husnuniyati (kedua dari kiri), saat bertukar cenderamata di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi II ke Kantor Wilayah (Kanwil) pertanahan, Provinsi Jawa Timur.

Menyelidiki Temuan Jenazah di Bekasi

Penemuan jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat menyita perhatian publik. Tak terkecuali Komisi III DPR RI yang melihat dari dekat ke tempat kejadian perkara (TKP). Komisi III DPR pun menyerukan penyelidikan transparan atas temuan ini.

Yang menghebohkan, di TKP tersebut ditemukan tujuh jenazah laki-laki. pada 24 September lalu. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, tujuan delegasi Komisi III ke TKP tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kejadian tersebut. "Kami ingin lebih tahu kejadian yang sebenarnya, Pak Kapolres," ungkap Habib kepada Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani Hamdani yang hadir pula di TKP.

Komisi III DPR RI mendesak penyelidikan atas kasus ini secara transparan, agar tidak muncul spekulasi atau tuduhan yang tidak berdasar terkait kasus ini. "Kami berharap penyelidikan dilakukan secara terbuka, termasuk latar belakang kejadian ini harus jelas," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi ingin mendapatkan klarifikasi, apakah jasad tersebut menceburkan diri atau ada kemungkinan diceburkan oleh oknum aparat yang tengah berjaga.

"Kalau melihat dari pemberitaan yang ada, korban ini menceburkan diri ke sungai karena melihat ada patroli perintis, sehingga meninggal. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah benar mereka menceburkan diri? Itu pertama. Yang kedua, atau mereka sebenarnya diceburkan oleh oknum yang berpatroli?" tanya Aboe di Kali Bekasi. Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa saat kejadian menjelang tawuran pada Sabtu (21/9/2024) malam, jumlah orang yang berada di lokasi mencapai sekitar 60 orang. Sedangkan jumlah personel polisi yang berjaga hanya 9 orang.

"Memang kalau lihat yang hadir jumlahnya 60 orang dan sajam (senjata tajam) itu mengerikan dari

FOTO: UBED/VEL

Tim Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat meninjau langsung lokasi tempat ditemukannya tujuh jenazah remaja laki-laki, di Kali Bekasi.

> **Komisi III DPR RI mendesak penyelidikan atas kasus ini secara transparan, agar tidak muncul spekulasi atau tuduhan yang tidak berdasar terkait kasus ini**
>
> **Habiburokhman**
> **Wakil Ketua Komisi III DPR RI**

FOTO: UBED/VEL

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi (kedua dari kanan), saat meninjau langsung lokasi penemuan mayat mengapung di sungai Bekasi.

> **kita mendapat informasi bahwa tidak ditemukan luka-luka di tubuh para korban, Apa sebenarnya penyebab kematian mereka?**
>
> **Aboe Bakar Alhabsyi**
> **Anggota Komisi III DPR RI**

foto-foto yang ada, ya wajar," ujar politisi dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) ini. Ia kemudian bertanya soal penyebab kematian tujuh orang yang ditemukan tersebut. Habib Aboe menilai, jumlah jasad itu tak sedikit dan saat ini tengah menjadi atensi publik. "Yang kedua, kita mendapat informasi bahwa tidak ditemukan luka-luka di tubuh para korban? Apa sebenarnya penyebab kematian mereka? Apakah mabuk? Atau apa? Dan sebagainya. Apakah karena keracunan, ya? Atau karena tenggelam?" tutur Aboe.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, memberikan apresiasi atas kerja cepat pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. "Kami ucapkan apresiasi atas kerja dan respon cepat yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Bekasi, lalu Pak Kapolda Metro yang bisa menjawab segala perasaan dan keraguan masyarakat," ujar Arteria di Bekasi. Ia menekankan bahwa aparat kepolisian telah menjalankan tugasnya dengan baik di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

Komisi III DPR RI, lanjut Arteria, mendukung penuh penyelidikan yang tengah berlangsung. Ia juga memuji langkah Kapolda Metro Jaya yang langsung melibatkan berbagai pihak, termasuk tim Inafis, untuk membantu mengungkap kasus ini. "Mudah-mudahan dapat menjawab yang tidak terang benderang, sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan visinya Pak Kapolri yang namanya presisi," tutupnya.

Proses penyelidikan masih terus berlangsung, dengan harapan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. **uf/mh**

FOTO: UBED/VEL

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan (kedua dari kiri), saat meninjau langsung lokasi penemuan mayat mengapung di sungai Bekasi.

Mengoptimalkan Peternakan dan Stabilitas Pangan Nasional

Sektor pertanian terus didorong agar produktif, menopang perekonomian rakyat. Dari peternakan, perikanan, sampai produk pangan mendapat perhatian khusus Komisi IV DPR RI. Pemerintah pun diimbau menjalin kerja sama optimal dengan para pelaku usaha.

FOTO: AYU/VEL

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat meninjau wilayah PERHUTANI di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024).

Pada kunjungan kerja ke Lembang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024) silam, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengimbau PT. Purhutani bekerja sama dengan peternak sapi untuk memanfaatkan wilayah hutan demi meningkatkan produksi susu dan daging. Sudin menyebutkan, sekitar 80-90 persen kebutuhan susu dan daging sapi di Indonesia masih diimpor. Menurutnya, penurunan produksi dalam negeri disebabkan keterbatasan lahan dan dampak dari penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sebelumnya menyerang banyak peternak.

"Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, tidak bisa hanya mengandalkan peternak karena keterbatasan lahan dan pangan. Perhutani harus bisa memfasilitasi kerja sama pemanfaatan lahan hutan agar peternak sapi bisa meningkatkan produksi," ujar Sudin. Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menegaskan pentingnya regulasi pemerintah untuk mendukung sektor peternakan daripada mengandalkan impor, yang dinilainya tidak selalu efektif.

> **Penurunan produksi dalam negeri disebabkan keterbatasan lahan dan dampak dari penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sebelumnya menyerang banyak peternak.**
>
> **Sudin**
> **Ketua Komisi IV DPR RI**

Selain sektor peternakan, Komisi IV DPR RI juga fokus pada pengembangan budidaya ikan hias, terutama ikan arwana, yang dianggap sebagai komoditas unggulan ekspor. Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar, dalam kunjungan kerjanya di Bandung, menyoroti potensi besar ikan arwana yang berasal dari Kalimantan dan Papua, untuk berkembang di pasar internasional.

"Ikan arwana adalah modal dasar Indonesia. Dengan dukungan pengusaha serta pemerintah, budidaya ikan ini bisa menjadi

FOTO: ULFI/VEL

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar saat memimpin pertemuan Kunsfik di Bandung, Jawa Barat, Rabu, (18/09/2024).

> **Kunjungan kerjanya di Bandung, menyoroti potensi besar ikan arwana, yang berasal dari Kalimantan dan Papua untuk berkembang di pasar internasional**
>
> **Mindo Sianipar**
> **Anggota Komisi IV DPR RI**

ekspor unggulan," kata Mindo di Bandung, Jawa Barat, Rabu, (18/09/2024) silam. Ia menekankan, kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha dalam hal regulasi dan pengembangan teknologi budidaya. Selain itu, Mindo juga memuji inovasi budidaya ikan secara vertikal, yang memanfaatkan ruang lebih efisien. Ia berharap konsep ini bisa diterapkan secara luas, termasuk di sektor perumahan, agar penggunaan lahan tetap optimal.

Keterasediaan Pangan

Pada kunjungan ke Pasar Atas Cimahi, Kota Cimahi, Komisi IV meninjau ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini, menyampaikan bahwa ketersediaan bahan pangan di pasar masih dalam kategori aman, meski impor beras terus meningkat.

"Bahan-bahan seperti beras, telur, ikan, dan daging masih tersedia dengan harga yang bisa diakses masyarakat. Namun, kita mencatat ada impor beras yang mencapai 3,5 juta ton sejak awal tahun. Ini harus diwaspadai agar tidak terus meningkat," ujar Anggia saat diwawancarai Parlementaria usai tinjauan, Rabu (18/9/2024) silam.

Komisi IV, katanya, akan terus melakukan pengawasan agar pemerintah dapat meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, sekaligus mendukung kerja sama antara petani, peternak, dan pelaku usaha. Harapan besarnya, tercipta ketahanan pangan nasional yang lebih kuat dan stabilitas harga yang terjaga bagi masyarakat.

Kunjungan-kunjungan tersebut menegaskan komitmen DPR RI dalam mendorong sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi dalam negeri di berbagai sektor, mulai dari peternakan, perikanan, hingga stabilitas pangan. **ayu,pun/mh**

FOTO: PUNTHO/VEL

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat mengecek ketersediaan bahan dan harga pangan ke Pasar Atas Cimahi, Kota Cimahi.

Pantau Pembangunan Infrastruktur di Tiga Wilayah

FOTO: AARON/VEL

Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat meninjau progress pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Komisi V DPR RI terus aktif memantau pembangunan infrastruktur di tiga wilayah khusus, Ibu Kota Nusatara, Kaltim, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Likupang, Sulut, dan pelabuhan rakyat di Kaltara.

Dalam kunjungan kerja ke IKN, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw, mengungkapkan, pembangunan rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) hampir rampung dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. "Saya melihat progres pembangunan untuk pemindahan ASN terkait perumahan dan lainnya sudah hampir final," kata Roberth usai memimpin kunjungan di IKN, Kaltim, Kamis (12/9/2024) silam.

Roberth menyoroti perlu perbaikan infrastruktur jalan menuju IKN, khususnya jalan provinsi yang mengalami banyak guncangan meski dilalui dengan kecepatan di bawah 100 km/jam. Harusnya, pengerjaan jalan di IKN bisa berlangsung cepat dan rapi.

Sementara itu, di kawasan KSPN Likupang, Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhammad Iqbal, meminta pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk mendukung pariwisata di daerah tersebut.

FOTO: ICHA/VEL

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal saat memimpin Kunsfik di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.

"Kementerian PUPR harus bekerja sama dengan kementerian lain, terutama Kementerian Pariwisata, untuk menarik investor dan mengembangkan KSPN ini," jelasnya saat kunjungan di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Kamis (12/9/2024) lampau.

Selain infrastruktur, Iqbal juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat domestik yang membebani masyarakat. "Kita berharap pemerintah bisa menurunkan harga tiket domestik agar lebih terjangkau," ujarnya.

Pelayaran Rakyat

Komisi V DPR tengah menyiapkan revisi UU Pelayaran untuk mendukung pelayaran rakyat. Di Kalimantan Utara (Kaltara), Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo menyerukan, agar otoritas pelabuhan fokus pada pengembangan pelayaran rakyat (pelra). Ini penting untuk mengurangi beban jalan darat akibat angkutan barang yang berlebihan.

Biasanya angkutan logistik dari pelabuhan selalu mengakses transportasi darat untuk distribusi barang. Akibatnya, infrastruktur jalan banyak rusak akibat dilewati truk-truk kontainer dengan beban yang sangat berat. Nah, dengan pelayaran rakyat, akses jalan darat bisa dikurangi dengan memanfaatkan jalur laut dan sungai untuk angkutan barang.

Dikatakan Sigit, pelra dapat menjadi solusi dalam menjaga infrastruktur jalan dan membangkitkan ekonomi lokal. "Pelayaran rakyat bisa dimanfaatkan untuk bongkar muat peti kemas di pelabuhan, sehingga angkutan barang melalui jalan darat bisa dikurangi," jelas Sigit saat meninjau Pelabuhan Malundung, Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (12/9/2024) silam.

Komisi V berharap penguatan pelayaran rakyat dapat menghidupkan kembali ekonomi masyarakat pesisir, sambil memastikan keselamatan pelra tetap terjamin. **ica, aas,mh/mh**

> **Pelayaran rakyat bisa dimanfaatkan untuk bongkar muat peti kemas di pelabuhan, sehingga angkutan barang melalui jalan darat bisa dikurangi.**
>
> **Sigit Sosiantomo**
> **Anggota Komisi V DPR RI**

FOTO: HUSEN/VEL

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat meninjau Pelabuhan Malundung, Tarakan, Kalimantan Utara.

Mengawasi Distribusi BBM ke Seluruh Nusantara

FOTO: ARIEF/VEL

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Tim Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kementerian BUMN, PT Pertamina International Shipping serta PT Pertamina Energy Terminal, di Batam.

PT Pertamina International Shipping (PT PIS) anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bertanggung jawab atas distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh Nusantara. Karena perannya yang strategis, PT. PIS diimbau memiliki armada sendiri untuk distribusi.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendesak hal tersebut saat mengikuti kunjungan kerja ke PT. Pertamina Energi Terminal, Batam, Kepri, Jumat (27/9/2024) lalu. "Karena sangat vital, maka kami menyarankan PT PIS harus punya armada sendiri. Selain menjalankan tugas untuk memenuhi kebutuhan Pertamina, PT PIS juga sebagai shipping service. Artinya, bisa saja digunakan oleh pihak manapun di seluruh dunia ke

> **Pengembangan usahanya harus betul-betul menguntungkan bagi semuanya. Bagi perusahaan dan negara, karena ini adalah sub holding dari pertamina.**
>
> **Herman Khaeron**
> **Anggota Komisi VI DPR RI**

manapun dan dari manapun" kata politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Herman menilai, armada yang dimiliki PT PIS masih belum ideal untuk memasok kebutuhan minyak di perairan. Pasalnya, armada kapal PT PIS tidak berada di bawah pengelolaannya. PT PIS memiliki dua terminal energi, yaitu tanjung urban integrated terminal serta terminal energi pulau sambu. Sehingga, PT PIS sebagai pemasok BBM di perairan dapat memaksimalkan potensi pasar Batam sebagai jalur utama pelayaran Indonesia.

"Pengembangan usahanya harus betul-betul menguntungkan bagi semuanya. Bagi perusahaan dan negara, karena ini adalah sub holding dari Pertamina. Oleh karena itu, keberadaan terminal energi juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Tidak mudah, tidak sederhana tetapi ini bisa dijalankan profesional. Jalankan dengan baik supaya tidak ada masalah," tutupnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal mengatakan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah perairan yang strategis karena dilalui oleh ratusan kapal setiap harinya. Oleh karena itu, PT PIS diharapkan dapat memaksimalkan distribusi penjualan minyak kepada ratusan kapal yang melintas di perairan Kepri.

"Perairan Batam merupakan jalur strategis yang kerap dilintasi oleh kapal dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, diharapkan sebagai pemasok bahan bakar minyak, perairan nusantara, (PT PIS) dapat memaksimalkan penjualan hingga ke pasar luar negeri yang tentunya perlu adanya dukungan DPR agar pengembangannya sesuai dengan kebutuhan," ujar Erizal kepada Parlementaria, di Batam, Kepri, Jumat (27/09/2024) lalu.

Politisi Fraksi PAN itu menjelaskan, optimalisasi potensi pasar di perairan Batam perlu dikaji dalam berbagai aspek. Mulai dari aspek profit hingga aspek kebutuhan energi dalam negeri. Karena itu, pemerintah perlu memastikan penjualan energi ke pasar internasional tidak mengganggu pasokan untuk kebutuhan energi dalam negeri.

"Perairan selat Malaka dilalui kapal sekitar 6000 kapal per tahun. Artinya, 200 kapal perhari melintas. Tentunya ini potensi pasar yang besar. Oleh karenanya, kita berharap PT PIS melihat potensi pasar yang besar ini sejauh mana bisa berpartisipasi dalam menangkap market yang ada yang berkaitan dengan potensi demand dari luar dan dalam negeri. Tentu harus dipersiapkan sarana prasarana, Ini tentu perlu dukungan DPR kkhususnya sekarang di komisi VI DPR RI," tutupnya. **afr/mh**

FOTO: ARIEF/VEL

Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal saat bertukar cenderamata usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VI ke Batam.

Mengawasi Emisi PLTU Suralaya

Emisi karbon yang masih mencemari langit Nusantara perlu terus diawasi agar berkurang, bahkan hilang sama sekali. Di PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, isu emisi ini mengemuka kembali. Apalagi, daerah ini sangat dekat dengan ibu kota Jakarta.

FOTO: HIRA/VEL

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat kunjungan kerja Komisi VII ke PLTU Suralaya, di Cilegon, Banten, Jumat (27/9/2024).

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyebut kunjungan kerja Komisi VII ke PLTU Suralaya, Cilegon, sangatlah penting. Sebagai penghasil listrik dari bahan batubara yang menghasilkan emisi, tata kelola PLTU ini menjadi penting untuk diawasi.

"Sebagaimana kita ketahui, PLTU Suralaya itu juga dekat dengan ibu kota. Maka sensitifitasnya sangat tinggi, menyangkut emisi," ujar Sugeng kepada Parlementaria di Cilegon, Banten, Jumat (27/9/2024) lalu. Indonesia sendiri berkomitmen pada net zero emission yang ditunjukkan dari turut sertanya Indonesia dalam penandatanganan Paris Agreement. Harus diakui bahwa 67 persen PLTU di Indonesia masih menggunkan batubara.

Maka dari itu, dirinya berharap PLTU Suralaya menjadi *best practice* pengelolaan energi, khususnya listrik dengan PLTU batubara ini. Terlebih, salah satu penyumbang pemanasan global itu adalah meluncurnya emisi dari bahan bakar fosil. "Dalam hal ini juga (PLTU) terbesar (sumber energinya) adalah batubara. Sementara kita justru memakai batubara. Inilah yang menjadi energi primer dalam kelistrikan kita, dan juga apa yang terjadi di Suralaya ini," ungkapnya.

Sugeng mengungkapkan bahwa penerapan ESG (Environment, Social and Governance) di PLTU Suralaya menjadi poin yang ditekankan. Adapun dalam kunjungan tersebut ia menemukan bahwa tata kelola PLTU Suralaya ini sudah baik.

"Tadi kita checklist sampai satu persatu apa yang dilakukan.

Satu, misalnya, pembangkit PLTU batubara dengan sistem ultra critical. Ultra critical artinya di blower-nya itu dengan cara pemanasan atau pembakaran yang hampir 100 persen pembakaran. Jadi Batubara terbakar seluruhnya. Memang betul masih ada sisa pembakaran, maka berupa karbon yang meluncur itu diterapkan juga sistem carbon capture and storage. Jadi, sangat bagus praktik itu," terang politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah masukan yang diberikan Komisi VII untuk PLTU Suralaya ini. Di antaranya mengenai program CSR yang dilaksanakan PLTU tersebut. "Bagus itu. Satu sisi pemberdayaan masyarakat tetapi juga bagaimana penghijauan-penghijauan misalnya. Di lingkungan sini kalau kita lihat untuk masuk kawasan sini kan memang harus diakui. Kanan kiri ada beberapa kawasan hutan yang kita harapkan PLTU Suralaya ikut berpartisipasi ke sana, ke arah sana," tutupnya.

PLTS Purwakarta

Di Purwakarta, Jawa Barat, isu Pembangkit Lsitrik Tenaga Surya (PLTS) juga jadi perbincangan. Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan bahwa PLTS dengan sistem *ground-mounted* di Kawasan Industri Kota Bukit Indah mampu mengurangi pemakaian listrik 90 persen. Bahkan, kawasan yang dibangun oleh PT Aruna Hijau Power dalam waktu 6,7 bulan itu dapat menyumbang pengurangan karbon dioksida sebanyak 118.725 ton.

"Ini 100 persen semua produk China. Saya sampaikan kepada Kementerian ESDM dan Kemenperin, seharusnya regulasi investasi dan manufaktur mengatur investor energi baru dan energi terbarukan (EBET) harus menggunakan komponen dalam negeri semaksimal mungkin, karena ini menjadi roadmap bagi Indonesia ke depan. Indonesia bisa mereplikasi dari rekayasa engineering yang ada," katanya di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (27/9/2024) silam.

Ia melanjutkan, sesuai kesepakatan Paris Agreement dan The Nationally Determined Contributions (NDCs) pada tahun 2030-2060 Indonesia harus menyelesaikan 912 juta ton karbon dioksida untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim. Untuk itu, Komisi VII DPR meninjau PLTS penyuplai listrik terbesar di Indonesia yang memiliki 100 MWp ini.

"PLTS ini materialnya semua impor. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini, 100 persen materianlnya dari China. Saya minta ke depan tentu ada regulasi yang memisahkan antara TKDN jasa dan TKDN sistem yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar tidak lagi bergantung pada negara lain," jelasnya. **hal, cas/mh**

FOTO: CHASBI/VEL

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Tim Komisi VII ke Kabupaten Purwakarta.

Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana dan Pengelolaan Zakat

FOTO: NADHEN/VEL

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, saat bertukar cenderamata disela-sela Kunker Spesifik Komisi VIII ke Pusdiklat BNPB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Peningkatan pelayanan publik di sektor sosial dan kebencanaan diharapkan terus meningkat. Masyarakat di Tanah Air sangat membutuhkan layanan cepat, apalagi di masa bencana.

Ketua Komisi VII DPR Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat memimpin kunjungan ke Pusdiklat BNPB, Bogor, Jawa Barat, menyerukan, BNPB agar membuka pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk publik. Menurutnya, edukasi mitigasi bencana di sekolah sangat penting, mengingat Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam karena letak geografisnya.

"Kami mendorong agar peningkatan Pusdiklat ini bukan hanya di lingkup internal BNPB saja, tetapi juga eksternal, terutama untuk mitigasi bencana di sekolah," kata Kahfi usai kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Pusdiklat BNPB, Kamis (12/9/2024l lalu. Kahfi melihat, kurangnya pemahaman masyarakat soal kesiapsiagaan bencana. Ini disebabkan birokrasi sosialisasi yang rumit di daerah. BNPB harus bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki koordinasi.

"BPBD ini berada di bawah

koordinasi pemerintah daerah. Jadi, kita dorong BNPB bekerja sama dengan Kemendagri agar sosialisasi kesiapsiagaan bencana lebih mudah," jelasnya.

Sementara di Depok, Jawa Barat, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial menyerahkan bantuan sosial berupa Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada masyarakat rentan di Kota Depok. Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan hidup layak untuk 21 penerima manfaat dan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat untuk 16 penerima manfaat.

"Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari," kata Anggota Komisi VIII Moekhlas Sidik. Ia menegaskan bahwa Komisi VIII selalu siap menampung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan yang berkaitan dengan mitra kerjanya, termasuk Kementerian Sosial dan beberapa lembaga lainnya.

"Jika ada kebutuhan atau masalah yang berkaitan dengan mitra kerja kami, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, dan kami akan meneruskan hal tersebut kepada menteri terkait untuk ditindaklanjuti," jelas Moekhlas. Ia berharap, bantuan ini dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

FOTO: GERALDI/VEL

Anggota Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik saat menyerahkan bantuan dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Di Bekasi, Jawa Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, mendorong Baznas Kota Bekasi mengembangkan layanan berbasis aplikasi guna memudahkan masyarakat menunaikan zakat.

FOTO: TAUFAN/VEL

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq saat Kunjungan Kerja Komisi VIII di Islamic Center, Kota Bekasi, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya, dengan kualitas layanan modern, masyarakat akan lebih tertarik membayar zakat melalui Baznas.

"Baznas harus meningkatkan kualitas layanan berbasis aplikasi agar masyarakat semakin tertarik dalam menunaikan zakat," ujar Maman dalam pertemuan di Islamic Center, Kota Bekasi. Ada tantangan dalam mencapai potensi optimal pengumpulan zakat, di antaranya literasi masyarakat yang masih rendah tentang zakat dan peran Baznas.

Edukasi dan promosi jadi keniscayaan untuk terus dilakukan, agar masyarakat kian sadar. "Pertama, literasi masyarakat masih rendah terhadap zakat. Kedua, peran Baznas dalam mengedukasi dan mempromosikan masih kurang," jelas Maman. Ia melihat, kepercayaan publik terhadap lembaga zakat masih perlu ditingkatkan.

Baznas, sambung anggota F-PKB DPR ini, perlu memperkuat komitmen, meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi. "Komitmen Baznas dalam mengumpulkan zakat harus ditingkatkan, dan manajemennya juga perlu diperbaiki," tegasnya. **go, ndn, tn/mh**

Mengawasi Pelaksanaan Bulan Imunisasi

Bulan imunisasi telah terselenggara di seluruh daerah. Masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan dan persepsi negatif masyarakat atas program ini.

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), begitu program ini diberi nama. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI pun memberi perhatian serius atas program ini. Komisi IX berkepentingan mengawasi BIAS. Kali ini pengawasan dilakukan di Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Bogor.

Meski dilaksanakan di dua kota besar seperti Tangsel, tantangan persepsi negatif dan minimnya edukasi imunisasi masih menjadi kendala utama.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, menyatakan bahwa pelaksanaan di Kabupaten Bogor berjalan cukup baik, tanpa ada masalah distribusi vaksin. "Di

> **Kabupaten Bogor sudah tidak ada kekurangan suplai vaksin dan tidak ada keterlambatan distribusi. Semoga hal ini bisa dipertahankan pada imunisasi bulan November nanti**
>
> **Nihayatul Wafiroh**
> **Wakil Ketua Komisi IX DPR RI**

FOTO: HANUM/VEL

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

FOTO: SAFITRI/VEL

Tim Kunsfik Komisi IX DPR RI saat foto bersama usai pertemuan di Kantor Wali Kota Tangsel, Jumat (19/9/2024).

Kabupaten Bogor sudah tidak ada kekurangan suplai vaksin dan tidak ada keterlambatan distribusi. Semoga hal ini bisa dipertahankan pada imunisasi bulan November nanti," harap Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, (19/09) lalu.

Namun, tantangan masih ada, seperti penolakan beberapa sekolah dan kondisi anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah, sehingga tidak mendapatkan vaksinasi. Hal ini memerlukan pendekatan khusus agar semua anak mendapatkan hak imunisasi.

Sementara di Tangsel, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, dalam kunjungan kerjanya, mempertanyakan pandangan tradisional orangtua yang masih enggan mengimunisasi anak mereka. "Apakah di Tangerang Selatan masih ada perspektif tradisional yang tidak mau anaknya diimunisasi? Kalau masih ada, itu akan menjadi tantangan tersendiri," ujarnya saat rapat di Kantor Wali Kota Tangsel, Jumat (19/9/2024) silam.

> **Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan orangtua untuk memastikan suksesnya program BIAS.**
>
> **Putih Sari**
> **Anggota Komisi IX DPR RI**

Menurutnya, ini menghambat upaya menekan penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi seperti hepatitis B, poliomyelitis, tuberkulosis, dan difteri. Padahal, imunisasi telah menjadi syarat masuk sekolah dasar, sebagaimana diatur dalam SKB 4 Menteri tahun 2022. Namun, tantangan sosial dan persepsi orangtua masih menjadi hambatan, meski imunisasi adalah bagian dari upaya kesehatan nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan orangtua untuk memastikan suksesnya program BIAS. Dengan kolaborasi berbagai pihak dan pendekatan yang lebih intensif, diharapkan cakupan imunisasi dapat ditingkatkan dan tantangan yang ada bisa diatasi. **srw, hnm/mh**

FOTO: DEP/VEL

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat mengikuti upacara penutupan PON XXI di Stadion Utama Sumatera Utama, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (20/9/2024) malam.

Mengevaluasi PON XXI 2024

Penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara telah berakhir September lalu. Evaluasi jadi keniscayaan untuk dilakukan.

Delegasi Komisi X DPR RI yang berkunjung ke Deli Serdang, Sumatera Utara, memberikan beberapa catatan penting menyangkut penyelenggaraan PON kali ini. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi antusiasme para atlet yang berpartisipasi, bahkan berhasil memecahkan rekor nasional.

Namun, ia menyoroti beberapa kendala, terutama terkait anggaran yang lebih kecil dibandingkan PON

sebelumnya di Papua. Pada PON XXI, kali pertama digelar di dua daerah. Cabang olahraga pun bertambah. Namun, anggaran yang digelontorkan justru lebih kecil daripada penyelenggaraan PON sebelumnya.

> **Ini adalah PON pertama yang diadakan di dua daerah sekaligus. Meski cabang olahraga bertambah, anggaran yang diberikan justru lebih kecil dibandingkan dengan PON Papua**
>
> **Hetifah Sjaifudian**
> **Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

"Ini adalah PON pertama yang diadakan di dua daerah sekaligus. Meski cabang olahraga bertambah, anggaran yang diberikan justru lebih kecil dibandingkan dengan PON Papua. Banyak hal yang perlu dievaluasi," ujar Hetifah di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Jumat (20/9/2024) silam.

Hetifah menyinggung kendala persiapan, meski Aceh dan Sumut telah ditunjuk sebagai tuan rumah lima tahun sebelumnya. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian terkait perlu diperbaiki agar penyelenggaraan ke depan lebih optimal. "Ke depan, perlu evaluasi apakah PON berikutnya memerlukan anggaran lebih besar atau pengurangan cabang olahraga," tutupnya.

FOTO: DEP/VEL

Anggota Komisi X DPR RI Rosiyati MH Thamrin dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (20/9/2024).

> **Kita tahu atlet membutuhkan asupan makanan dengan nutrisi yang baik, namun ini belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, beberapa venue juga masih belum rampung meski penyelenggaraan sudah dimulai**
>
> **Rosiyati MH Thamrin**
> **Anggota Komisi X DPR RI**

Senada dengan Hetifah, anggota Komisi X DPR RI Rosiyati MH Thamrin, juga menyoroti beberapa masalah yang muncul selama pelaksanaan PON XXI. Ia menekankan pentingnya evaluasi terutama terkait konsumsi makanan bagi para atlet dan kesiapan venue yang belum sepenuhnya selesai.

"Kita tahu atlet membutuhkan asupan makanan dengan nutrisi yang baik, namun ini belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, beberapa venue juga masih belum rampung meski penyelenggaraan sudah dimulai," ujar Rosiyati saat ditemui di Deli Serdang.

Rosiyati berharap, agar penyelenggaraan PON mendatang bisa lebih efisien, dengan memanfaatkan venue yang sudah ada daripada membangun fasilitas baru yang besar namun tidak terpakai setelah acara selesai. "Kita perlu bijak dalam menggunakan anggaran, terlebih negara masih memiliki banyak kebutuhan mendesak, seperti pendidikan," tandasnya.

PON XXI 2024 resmi ditutup oleh Menko PMK Muhadjir Effendi pada Jumat malam, menandai berakhirnya ajang olahraga nasional yang melibatkan ribuan atlet dari seluruh Indonesia. **dep/mh**

Pertumbuhan Ekonomi Bali Mulai Melejit

Usai pandemi Covid 19, ekonomi Bali menunjukkan tren positif. Ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata hingga mencapai 5,71 persen.

FOTO: FITRI/VEL

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi XI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas dan BPS di Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Badung, Bali.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam saat mengikuti kunjungan kerja ke Bali, mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonominya. "Belanja pemerintah yang digelontorkan ke Bali pada saat Covid itu luar biasa besar, melebihi dari daerah lain," ucapnya usai mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi XI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, dan BPS di Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Badung, Bali, Senin (5/8/2024) silam.

Berdasarkan indikator ekonomi, Bali sudah berada dalam posisi *recovery*, di mana angka kemiskinan di tahun 2023 sebesar 4,25 persen atau turun 0,32 persen dari tahun 2022 sebesar 4,57 persen. Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur dengan Indeks Gini Ratio adalah sebesar 0,362. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,363 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

"Jadi kalau dari indikator-indikator ekonomi, termasuk inflasi dan juga indikator kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, IPM, Bali bisa recovery kembali pada posisi 2019," ucap politisi Fraksi PKS ini.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memberi atensi dan intervensi atas perekonomian di wilayah lainnya selayaknya Bali. Ecky menyampaikan yang terkena Covid 19 dan terdampak tidak hanya Bali, sehingga pemerintah harus bisa melihat daerah-daerah lain yang tertinggal.

Ia lalu mendesak pemerintah dapat menggelontorkan dana bagi daerah-daerah yang ekonominya tertinggal. "Pemerintah tidak boleh merasa tenang ketika melihat ada provinsi-provinsi yang pertumbuhannya masih jauh dari pertumbuhan nasional," tandasnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI lainnya, Eriko Sotarduga memberikan perhatian khusus pada usaha milik Warga Negara Asing. Usaha ilegal yang umumnya bergerak di bidang jasa tersebut disinyalir mulai bermunculan sebagai dampak kembali masifnya kegiatan wisata di Bali.

"Hanya memang kita harus jujur ada efek sampingnya dari ini (menggeliatnya pariwisata Bali). Ada turis asing memanfaatkan ini untuk membuat perekonomian baru bagi mereka, padahal itu kan sebenarnya tidak boleh," tutur Eriko di Bali, Senin (5/8/2024) silam.

Selain itu, anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga menyoroti indikasi penggunaan mata uang virtual atau kripto dalam bisnis yang dijalankan secara ilegal oleh para turis asing. Untuk itu, Eriko mendorong Bank Indonesia menggandeng pemerintah daerah melakukan aksi penanggulangan pada masalah-masalah tersebut.

"Nah, ini yang kami sampaikan tadi kepada Bank Indonesia, agar sangat berhati-hati karena kripto bukan berarti tidak boleh tetapi di aturan di negara tidak boleh menjadi alat pembayaran sama seperti mata uang asing juga. Ini yang harus dilihat dan diamati dan juga harus ada aksi bersama pemerintah daerah. Tadi kami memberikan masukan itu," tuturnya.

Merujuk pada UU No.7/2011 tentang Mata Uang, alat pembayaran yang berlaku di Indonesia adalah mata uang rupiah. Sedangkan kripto sendiri ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. **srw, uc/mh**

FOTO: UCA/VEL

Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga saat Rapat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, Senin (5/8/2024).

Menjaga Kekayaan Pasir Laut

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pencurian pasir laut menjadi sorotan publik, terutama terkait dampaknya terhadap ekosistem dan ekonomi negara. Ini jadi peringatan bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan harta negara. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kesadaran kolektif, diharapkan masa depan kekayaan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Anggota DPR RI Anggia Ermarini, menyampaikan, pencurian pasir laut bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga ancaman serius bagi kekayaan alam Indonesia. "Ini namanya pencurian, jadi memang kriminal yang luar biasa. Apalagi kita di Indonesia pernah ada wacana ekspor pasir laut, tapi itu belum selesai. Kok, ini malah pencurian? Itu parah," tegasnya, pertengahan Oktober lalu.

Ia menambahkan, pencurian ini mencerminkan kurangnya upaya menjaga harta negara dan lingkungan. Serta menambah kompleksitas masalah. Sehingga, perlu memperkuat negosiasi dengan negara lain. "Yang mencuri negara lain, ini bikin kita harus berpikir keras. Negosiasi antarnegara harus

> **Pencurian ini mencerminkan kurangnya upaya menjaga harta negara dan lingkungan. Serta menambah kompleksitas masalah. Sehingga, perlu memperkuat negosiasi dengan negara lain**
>
> **Anggia Ermarini**
> **Anggota DPR RI**

FOTO: ARIEF/VEL

Anggota DPR RI Anggia Ermarini.

> **Selama ini, Indonesia belum memiliki coast guard yang benar-benar independen dan kuat. Kehadiran coast guard yang solid meruoakan langkah penting memperkuat pengawasan dan perlindungan kekayaan laut Indonesia.**
>
> **Johan Rosihan**
> **Anggota DPR RI**

FOTO: ARIEF/VEL

Anggota DPR RI Johan Rosihan.

dikuatkan supaya kita tidak mudah begitu," ujarnya.

Ia merasa prihatin bahwa Indonesia, yang memiliki kekayaan laut yang luar biasa, tidak serius menjaga dan melindunginya. Ia memandang, solusi untuk masalah ini perlu melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif. "Pertahanan harus dikuatkan. Apapun, mulai dari budaya, ikan, pasir, semuanya harus tetap kita jaga," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Johan Rosihan melihat, untuk menjaga kekayaan laut kita, adalah dengan mempercepat revisi Undang-Undang Kelautan. Dalam perubahan tersebut, salah satu poin penting yang perlu diselesaikan adalah memasukkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) ke dalam struktur pengaturan Undang-Undang Kelautan.

Selain itu, peran *coast guard* Indonesia menjadi sorotan utama dalam perubahan ini. Selama ini, Indonesia belum memiliki coast guard yang benar-benar *independen* dan kuat. Kehadiran *coast guard* yang solid merupakan langkah penting memperkuat pengawasan dan perlindungan kekayaan laut Indonesia.

"Apa yang belum selesai di periode kemarin, yaitu perubahan Undang-Undang Kelautan, itu harus segera diselesaikan" tegas legislator Fraksi PKS itu kepada Parlementaria, pertengahan Oktober silam. Untuk itu, penyelesaian terhadap perubahan Undang-Undang Kelautan harus segera dilakukan.

Melalui upaya ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga kedaulatan lautnya, mencegah pencurian sumber daya alam, termasuk pencurian pasir laut, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemanfaatan berkelanjutan dengan peran *coast guard* yang kuat dan efisien mengawal kekayaan alamnya. "Agar kekayaan alam kita ini, terutama kekayaan laut, bisa segera kita jaga dengan baik," tutupnya.

gal/mh

Diplomasi Parlemen Perkuat Identitas Bangsa

Menjelang pergantian periode keanggotaan DPR, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI meluncurkan empat buku sekaligus yang berisi pertanggungjawaban kinerja BKSAP periode 2019-2024.

FOTO: WILGA/VEL

Pimpinan BKSAP DPR RI saat menghadiri peluncuran empat buku dalam rangka rangkuman pertanggungjawaban kinerja BKSAP periode masa jabatan 2019-2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/9/2024).

Hasil kerja BKSAP selama satu priode tergambar jelas. Aksi diplomasi parlemen di forum-forum internasional juga diungkap. Empat buku tersebut diantaranya Membela Palestina Perjuangan BKSAP dan Diplomasi Parlemen, Diplomasi Parlemen Memulihkan Myanmar Menjaga ASEAN, Diplomasi Parlemen di Tengah Gejolak Dunia Peran BKSAP DPR RI di Kancah Parlemen Dunia, dan Membumikan Isu Internasional BKSAP Menyapa Kampus dan Masyarakat.

Ketua BKSAP DPR Fadli Zon menyampaikan bahwa BKSAP saat ini cukup aktif hingga memiliki posisi penting di forum parlemen dunia, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU). Kepentingan nasional selalu diperjuangkan lewat diplomasi parlemen

"Salah satu tanggung jawab dari Parlemen kita adalah bagaimana memperjuangkan kepentingan nasional kita dari sisi diplomasi parlemen sesuai dengan Undang-Undang MD3. kita juga melaporkan hasil-hasil diplomasi sepanjang lima tahun termasuk di masa COVID-19, yang dirangkum dalam empat buku," tutur Fadli Zon di Sentul, Bogor, Jawa Barat, September lalu.

Buku-buku ini turut mengandung satu nomenklatur diplomasi, yaitu diplomasi parlemen. Dengan sistem presidensial, parlemen menjadi penting sebagai bagian diplomasi negara. Salah satu isu yang diangkat adalah sawit dan nikel. Sejak 12

Oktober 2023 lalu, DPR lewat BKSAP juga telah bicara di forum G20 New Delhi, bagaimana bisa menghentikan perang di berbagai kawasan.

Ia menyebutkan diplomasi parlemen ini semakin memperkuat posisi Indonesia untuk Palestina, sehingga semakin dihormati negara lain di dunia. "Jadi perjuangan kita sejalan dengan garis politik luar negeri Indonesia untuk Palestina. Itu saya kira kuat dan dihormati oleh negara-negara lain termasuk negara-negara di Timur Tengah sendiri," terangnya.

Politisi Fraksi Gerindra itu menekankan, diplomasi bukan hanya tugas Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Diplomasi parlemen, tegasnya, turut berperan penting mendukung diplomasi negara. Sebab itu, ia berharap BKSAP bisa berkontribusi menciptakan perdamaian dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Seruan penghentian peperangan kerap diserukan pada forum-forum internasional.

"Bahwa diplomasi itu bukan sekadar tugas kementerian luar negeri saja, tetapi diplomasi parlemen juga sangat penting. Diplomasi budaya, ekonomi, dan diplomasi setiap individu warga negara, juga sebenarnya sangat penting untuk mendukung diplomasi negara untuk mencapai kepentingan nasional kita," pungkasnya.

> **BKSAP saat ini cukup aktif hingga memiliki posisi penting di forum parlemen dunia, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU). Kepentingan nasional selalu diperjuangkan lewat diplomasi parlemen**

Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu

Pada kesempatan yang sama, BKSAP DPR RI menggagas pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu. Fadli Zon menyampaikan asosiasi ini dibentuk supaya bahasa Indonesia bisa diakui dan digunakan dalam setiap forum parlemen dunia, terutama di ASEAN.

"Kami mendeklarasikan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu. Gagasan ini adalah bagaimana bahasa Indonesia dipakai di berbagai forum parlemen dunia, terutama di ASEAN dulu," kata Fadli. Gagasan ini sudah dimulai sejak 2021 lalu dan sudah banyak negara, terutama di ASEAN, yang telah menyetujui keberadaan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu.

"Jadi, Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu ini sebenarnya bukan proses baru, kita sudah memulai ini sejak 2021 lalu. Gagasan ini adalah bagaimana bahasa Indonesia dipakai di berbagai forum parlemen dunia, terutama di ASEAN dulu. Karena yang berbahasa Indonesia-Melayu ini kurang lebih 300 juta atau 320 juta orang," ucapnya.

BKSAP pun menggelar pertemuan dengan negara-negara mayoritas berbahasa Melayu, seperti parlemen Malaysia yang sangat setuju dengan gagasan ini. Begitu juga dengan parlemen Brunei, Timor Leste, dan Thailand. Jadi, setidaknya ada beberapa ketua parlemen yang sangat mendukung berdirinya Asosiasi Parlemen Berbahasa Melayu," sambung politisi Fraksi Gerindra ini.

Legislator Dapil Jawa Barat V itu berharap, suatu saat bahasa Indonesia dan Melayu dapat diakui dunia dan digunakan dalam pertemuan parlemen antarnegara. "Jadi, kita juga berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia ini bisa diterima suatu saat, paling tidak di ASEAN. Lalu, bahasa Indonesia nanti bisa diterima dalam bahasa kerja di dunia internasional, seperti PBB atau di tempat lain, tetapi harus dirintis dari sekarang" pungkasnya. **um/mh**

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)

Mufti Anam

Mendorong Penguatan UMKM Bagi Alumni Pesantren

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, berjanji akan mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu garapan para alumnus pesantren.

Hal itu sejalan dengan aspirasi sejumlah ikatan alumni pesantren yang ditemui Mufti dalam rangkaian kunjungannya ke daerah pemilihan, Pasuruan dan Probolinggo, belum lama ini.

"Banyak aspirasi yang saya rangkum dari pertemuan dengan berbagai kelompok warga, termasuk sahabat-sahabat alumnus pesantren di Probolinggo dan Pesantren. Salah satunya adalah penguatan UMKM, karena banyak santri yang kini mulai berwirausaha setelah lulus dari pesantren. Bahkan, sejak mereka di pesantren sudah banyak dididik ilmu kewirausahaan," ujar Mufti.

Sejumlah perkumpulan alumni pesantren yang ditemui Mufti antara lain Ikatan Alumni Santri Salafiyah (IKSAS), alumni Nurul Qadim, dan Ikatan Alumni Pesantren Bayt Al-Hikmah. Mufti mengatakan, penguatan UMKM tersebut mulai dari aspek penguasaan teknologi, pemasaran, kualitas sumberdaya manusia, hingga kemudahan akses permodalan. Semua aspek tersebut membentuk daya saing UMKM.

Mufti berjanji akan menyelaraskan aspirasi penguatan UMKM dengan program-program yang ada di kementerian dan lembaga terkait. **we/mh**

FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Mufti Anam, saat kunjungan kerja ke dapilnya di Pasuruan dan Probolinggo.

Hetifah Sjaifudian

Beri Pelatihan Pengrajin Batik

Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian, bekerja sama dengan Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, mengadakan pelatihan penguatan kapasitas bagi pengrajin batik.

FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian bersama Kemenparekraf saat mengadakan pelatihan penguatan kapasitas bagi pengrajin batik di Taman Budaya Kaltim.

Kegiatan bertajuk "Bimbingan Teknis Pewarnaan Batik dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif" ini berlangsung di Taman Budaya Kaltim, Agustus silam.

"Batik adalah warisan budaya tak benda yang diakui secara internasional. Kita harus mengoptimalkannya dengan baik. Saya berharap para pengrajin batik Kaltim terus berinovasi untuk menghasilkan motif-motif baru yang bernilai tinggi," jelas Hetifah.

Hetifah mengungkapkan bahwa batik merupakan komoditas unggulan Kaltim, meski jumlah pengrajin masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kualitas pengrajin menjadi fokus utama. Ia juga menekankan pentingnya narasi dalam setiap motif batik, mendorong para pengrajin untuk terus berinovasi.

Untuk memastikan keahlian profesi pembatik diakui oleh negara, Hetifah juga memfasilitasi kegiatan sertifikasi kompetensi pembatik. Sertifikasi ini melibatkan para asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Batik Indonesia.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Awang Khalik, ia menegaskan bahwa pengembangan batik terus menjadi prioritas, termasuk mendorong inovasi dari para pengrajin. Mengingat, sektor wastra sebagai sub sektor unggulan di Kaltim yang menyumbang 6,51 persen terhadap PDB daerah.

> **"Batik adalah warisan budaya tak benda yang diakui secara internasional. Kita harus mengoptimalkannya dengan baik.**

"Para pengrajin batik harus terus berinovasi dari tahap ide hingga produksi dan distribusi. Dinas Pariwisata siap membantu dalam hal *packaging* dan pemasaran, termasuk pemahaman mengenai *digital marketing* agar wisata Kaltim dapat menguasai pasar yang lebih luas," kata Awang. **rdn/mh**

Andre Rosiade

Saksikan Pelepasan Aset KAI Untuk Pengembangan RSUP M Djamil

FOTO : IST/VEL

Anggota DPR RI Andre Rosiade saat menyerahkan bantuan untuk pembangunan Masjid Taqwa di Sumbar.

Anggota DPR RI Andre Rosiade menghadiri penandatangan perjanjian ganti rugi atas pelepasan aset milik PT KAI (Persero) untuk pengembangan pelayanan kelas rawat inap standar (KRIS) di RSUP M Djamil Padang, di Gedung dr. Adhyatma Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengalihan lahan PT KAI untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang. Dalam kesempatan itu, Andre bersyukur atas terlaksananya penandatangan tersebut. Menurutnya, hasil ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukannya sebagai kader Partai Gerindra, yang selalu fokus membantu masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, kami akan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat Sumbar dan mengeksekusinya," kata Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI itu. Ia menegaskan, upaya yang cukup panjang guna memperjuangkan aspirasi dari RSUP M Djamil Padang akhirnya membuahkan hasil. Ia berharap, usaha untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan pembangunan daerah terus berlanjut di masa mendatang.

"Semoga kerja nyata kami sebagai anggota DPR RI terus dapat bermanfaat bagi masyarakat," tutupnya. Acara ini dihadiri Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Azhar Jaya, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari, Dirut RSUP M Djamil dr. Dovy Djanas, dan Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI Dadan Rudiansyah. **hal/mh**

Ratih Megasari Singkamua

Serahkan Bantuan PIP Untuk Para Siswa

Anggota DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyerahkan kartu bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada ratusan siswa di Kecamatan Mapilli dan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penyerahan dilakukan langsung kepada orangtua siswa, disaksikan para guru dan kepala sekolah.

FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Ratih Megasari Singkarru saat memberikan bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada ratusan siswa di Sulawesi Barat.

Penyerahan ini berlangsung di tiga lokasi, diantaranya SDN 003 Lampa dan SMPN 2 Campalagian. Setiap sekolah menerima jumlah bantuan (PIP) yang bervariasi sesuai usulan dari pihak sekolah. Salah satu orangtua siswa, Rasliati, mengungkapkan rasa syukur, karena dana yang diterima tanpa potongan. Bantuan langsung masuk ke rekening anak. Menurutnya, bantuan ini sangat membantu meringankan biaya pendidikan anak-anaknya.

Legislator Dapil Sulawesi Barat ini menyampaikan bahwa kuota beasiswa PIP melalui jalur aspirasi yang diupayakannya akan terus bertambah setiap tahunnya, sehingga semakin banyak siswa yang tersentuh. Ratih berharap agar setelah pencairan dana PIP, bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh siswa.

"Masyarakat sudah merasakan manfaatnya sehingga ke depan akan terus bertambah, sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Kepada orangtua siswa, tolong uang ini segera di belikan keperluan sekolah anaknya untuk digunakan bersekolah," tutup Ratih yang kembali bertugas di Komisi X DPR RI pada periode 2024-2029. **uc/mh**

Ratna Juwita Sari

Bantu Salurkan Pasang Baru Listrik (BPBL)

Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan penyaluran pertama Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Talangkembar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Program bantuan ini merupakan kerja sama Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sejak tahun 2022, BPBL sudah bergulir ke publik. Bantuan yang disalurkan pada September silam itu, mendapat apresiasi luas dari masyarakat setempat.

Legislator dapil Jawa Timur IX itu mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian ini. "Alhamdulillah, program bantuan pasang baru listrik gratis ini telah menjangkau 10.473 keluarga di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Melihat wajah-wajah bahagia para penerima manfaat, saya merasa sangat berguna sebagai seorang manusia," ujarnya dengan penuh syukur.

Ia juga menekankan pentingnya program ini bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap listrik yang merupakan kebutuhan dasar. "Semoga saya bisa terus melanjutkan perjuangan dan memberikan hikmat untuk masyarakat di kedua kabupaten tersebut," tambahnya.

FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari saat menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Jawa Timur.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan akses listrik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penyaluran BPBL diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup dan menjawab kebutuhan energi di wilayah tersebut. **gal/mh**

Edhie Baskoro Yudhoyono

Ajak Generasi Muda Ngawi Berkontribusi bagi Bangsa

Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas menyerukan kepada generasi muda di Ngawi, Jawa Timur, untuk aktif berkontribusi nyata bagi Bangsa Indonesia. Itu, ia sampaikan dalam acara "NGOBRAS" (Ngobrol Asik Bersama Ibas) beberapa waktu lalu.

FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono saat serap aspirasi dari generasi muda di Ngawi, Jawa Timur.

Ibas mengajak generasi millennial dan Gen Z untuk lebih aktif dan tidak pasif dalam menjalani hidup. "Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi, ada juga pengalaman, sudah kenal malah ditinggal," ujarnya di hadapan kaum muda Ngawi.

Ibas yang kini menjadi Wakil Ketua MPR RI itu, rutin menggelar acara NGOBRAS untuk menyerap aspirasi dan berdiskusi langsung dengan generasi muda di daerah pemilihannya, Jawa Timur VII (Ngawi, Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek).

Ibas selalu menyampaikan pesan penting agar generasi muda menjaga kesantunan, semangat berkarya, dan produktif. "Ojo rebahan. Dengarkan, pelajari, dan catat pengalaman yang baik dari orangtua, guru, atau senior," pesannya.

Generasi milenial dan gen Z, sambungnya lagi, tidak boleh takut gagal. Sebaliknya, harus selalu yakin dalam melakukan sesuatu. "Just do it! Jalankan saja, lakukan saja. Kalau kita percaya dan yakin, pasti bisa," tambahnya. Selain itu, Ibas mengingatkan anak muda Ngawi untuk terus bergerak dan berkontribusi bagi bangsa demi terwujudnya perubahan dan perbaikan.

Acara tersebut mendapat sambutan antusias dari para peserta. Mereka secara aktif menyampaikan aspirasi dan pertanyaan, termasuk mengenai program pendidikan di daerah 3T dan beasiswa S2 bagi guru. Ibas pun membagikan kiat suksesnya, "Fokus pada apa yang ingin kita lakukan, dengan passion dan keinginan kuat. Jika gagal, tetap coba lagi, jangan pernah menyerah," tegasnya. **rnm/mh**

Meitri Citra Wardani

Turun Langsung, Serap Aspirasi

Anggota DPR RI Meitri Citra Wardani menemui konstituennya di Ballroom Hotel Ayola Kota Mojokerto, Jawa Timur, Oktober lalu. Acara tersebut dihadiri ratusan warga yang terdiri dari unsur masyarakat, relawan daerah pemilihan Jawa Timur VIII yang meliputi Mojokerto, Madiun, Jombang, dan Nganjuk.

"Saya meyakini, menjadi pelayan rakyat yang aspiratif hanya bisa ditunaikan ketika kita mengetahui apa yang menjadi problem masyarakat kita. Untuk itu, selain meminta masukan guna menentukan arah kerja kami ke depan, pertemuan ini penting untuk mengukuhkan kedekatan dengan konstituen," ujar Meitri.

Politisi PKS ini telah menyusun program yang bisa diperjuangkan sesuai kebutuhan masyarakat di dapilnya. Dalam sambutannya, Meitri menyampaikan pentingnya peran kolaborasi antara masyarakat dengan wakil rakyatnya dalam memecahkan persoalan. Baginya, konstituen adalah aktor yang punya peran aktif dalam turut andil menyampaikan informasi aktual terkait masalah di lapangan

"Sementara, kami di Jakarta akan berupaya mencari solusi dari masalah tersebut sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki, berkolaborasi dengan mitra kami di pemerintah pusat," jelasnya Meitri yang juga Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Meitri mengungkapkan, pihaknya telah menyediakan akun sosial media pribadinya untuk memudahkan interaksi dengan warga. Bahkan, dalam waktu dekat ia juga akan menyediakan layanan Rumah Aspirasi yang dihuni tim dapil untuk menerima berbagai masukan serta informasi yang perlu untuk ditindaklanjuti.

pun/mh

FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Meitri Citra Wardani saat serap asmirasi dari warga dapilnya di Jawa Timur.

Muhammad Rizal

Sosialisasikan Pentingnya BPJS dan Germas di Tangerang

Anggota DPR RI Fraksi PAN Muhammad Rizal (PAW Periode 2021-2024) terus aktif melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan mengedukasi masyarakat di daerah pemilihannya, Banten III. Dalam beberapa bulan terakhir, Rizal menggelar serangkaian sosialisasi terkait jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan serta kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di wilayah Tangerang.

Dalam kunjungannya pada 23 September 2024, Rizal fokus menjelaskan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Ia menekankan bahwa jaminan sosial ini merupakan upaya negara untuk melindungi hak pekerja atas keselamatan kerja, kesehatan, dan kesejahteraan di masa tua. "Program ini bukan hanya untuk pekerja formal, tetapi juga untuk sektor informal. Setiap warga berhak mendapatkan perlindungan dari risiko pekerjaan," ujar Rizal di hadapan warga Tangerang.

Rizal menyebut, masih banyak warga yang belum memahami sepenuhnya manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mendorongnya untuk melakukan edukasi langsung ke lapangan. "Kita ingin masyarakat tidak hanya mendaftar, tetapi juga benar-benar memahami bahwa ada jaminan yang melindungi mereka di saat terjadi risiko kerja. BPJS Ketenagakerjaan memberikan keamanan bagi masa depan kita," tegasnya.

Tak hanya soal jaminan sosial, Rizal juga aktif mendorong gaya hidup sehat melalui kampanye Germas. Pada acara sosialisasi yang berlangsung di beberapa titik di Tangerang, Rizal mengajak warga untuk menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai penyakit. "Dengan Germas, kita diajak untuk lebih memperhatikan kesehatan diri. Hidup sehat bukan hanya tentang makan-makanan bergizi, tapi juga olahraga teratur dan menjaga kebersihan lingkungan," tuturnya.

Program Germas ini diinisiasi pemerintah sebagai langkah preventif untuk menekan angka penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Rizal berharap, dengan adanya sosialisasi ini, warga semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga. "Kalau kita sehat, produktivitas kerja meningkat. Ini juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya. **aha/mh**

FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Fraksi PAN Muhammad Rizal saat mengadakan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan serta kampanye Germas di Tangerang.

Istana Kuning
dan Coto Manggala

Pangkalan Bun sarat peninggalan budaya dan sejarah Nusantara. Salah satu bukti nyata yang masih tersisa adalah Istana Kuning, yang menjadi saksi berdirinya sebuah kerajaan Islam yang sempat berjaya pada masanya, yaitu Kesultanan Kotawaringin.

FOTO: AHA

Tahta Kesultanan Kotawaringin.

Pengunjung berfoto di tahta raja.

Gerbang dari menara Istana Kuning.

Istana ini merupakan simbol kejayaan masa lalu yang menyimpan banyak kisah menarik tentang perjalanan sejarah di Kalimantan. Istana ini pada mulanya adalah tempat tinggal para raja Kesultanan Kotawaringin yang bergelar 'Pangeran Ratu'. Gelar ini memiliki makna yang dalam, karena menunjukkan bahwa Kotawaringin pada masa itu masih merupakan bagian dari Kesultanan Banjar yang beribu kota di Banjarmasin.

Hanya penguasa Banjar yang berhak menyandang gelar sultan, dan oleh karenanya, penguasa Kotawaringin menyandang gelar yang berbeda, meskipun mereka tetap memiliki kekuasaan otonom. Sebagai wilayah kadipaten, Kotawaringin tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh Banjar, meskipun pada akhirnya berkembang menjadi kekuatan yang mandiri.

Situasi ekonomi-politik pada abad ke-18 turut berperan dalam memperkuat otonomi kekuasaan di Kotawaringin. Terletak di pedalaman Kalimantan Selatan, wilayah ini mendapatkan keuntungan dari semakin ramainya jalur perdagangan yang melalui kampung-kampung di sepanjang sungai. Sungai-sungai di selatan Borneo, termasuk yang melintasi Pangkalan Bun, menjadi jalur utama bagi aktivitas ekonomi, perdagangan, dan distribusi barang dari pedalaman hingga ke pesisir. Kotawaringin yang semula hanya menjadi kadipaten kecil, berkembang pesat karena letaknya yang strategis.

Bangunan istana yang sekarang berdiri sebenarnya merupakan replika dari bangunan asli yang pernah terbakar. Sebelumnya, istana ini dibangun menggunakan kayu ulin, yang dikenal sebagai kayu besi, karena daya tahannya yang luar biasa terhadap air dan serangan rayap. Kayu ulin hanya bisa ditemui di hutan-hutan Kalimantan, menjadikannya material yang sangat berharga dan sering digunakan dalam konstruksi bangunan besar, termasuk kapal laut. Istana ini dulunya memiliki peran yang penting dalam perdagangan kayu untuk pembuatan kapal di Jawa, terutama pada paruh abad ke-16 hingga ke-18.

Posisi istana ini sendiri sangat strategis. Terletak di atas bukit yang menghadap ke sungai Bu'un, istana ini memiliki keuntungan dari segi pertahanan dan juga kontrol jalur transportasi. Sungai Bu'un menjadi arus transportasi utama baik di masa lalu maupun sekarang. "Posisi Istana di atas bukit ini ada sebabnya. Para tamu raja yang akan masuk istana pasti akan menunduk karena mendaki selasarnya," jelas Pak Adi, juru kunci istana, kepada saya saat berkunjung. Menurutnya, posisi ini dirancang sedemikian rupa agar tamu yang datang menunjukkan sikap tunduk sebagai bentuk penghormatan kepada tahta kesultanan.

Kebakaran yang melanda istana pada masa lalu bukan hanya membakar fisik bangunan, tetapi juga sebagian dari sejarah yang tersimpan

di dalamnya. Namun, upaya untuk membangun kembali istana ini dengan desain yang menyerupai aslinya menunjukkan betapa pentingnya keberadaan istana ini sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah masyarakat setempat. Kayu ulin yang digunakan untuk membangun istana pun memiliki makna simbolis, sebagai representasi dari kekuatan dan ketahanan kesultanan di masa lalu.

Istana ini mendapatkan nama "Istana Kuning" karena kayu ulin yang digunakan secara alami berubah warna menjadi kuning seiring berjalannya waktu. Warna kuning ini bukan sekadar perubahan alami kayu, tetapi juga memiliki makna simbolis. Dalam budaya Melayu, kuning adalah warna yang sering dikaitkan dengan kemakmuran, kebesaran, dan kekuasaan.

Ini sejalan dengan simbolisme warna kuning di berbagai kesultanan Melayu lainnya, seperti Istana Maimun di Kesultanan Deli, Medan, dan Istana Kesultanan Riau-Lingga di Pulau Penyengat. Kedua istana tersebut juga menggunakan warna kuning untuk menggambarkan kemegahan dan kejayaan kesultanan.

Coto Manggala dan singkongnya.

> **Makanan ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner lokal yang dipengaruhi oleh budaya Banjar dan Melayu. Penggunaan singkong sebagai pengganti nasi dalam coto memberikan sentuhan yang unik dan menambah keberagaman cita rasa**

Setelah puas menjelajahi sejarah dan kemegahan Istana Kuning, saya memutuskan untuk mencicipi salah satu kuliner khas Pangkalan Bun, yaitu Coto Manggala. Makanan ini merupakan salah satu sajian yang paling banyak ditemui di Kabupaten Kotawaringin Barat, baik untuk sarapan maupun makan siang. Manggala, dalam bahasa Banjar, berarti singkong, yang menjadi bahan utama dalam hidangan ini. Jika di banyak tempat soto menggunakan nasi sebagai pendamping, di Pangkalan Bun, singkong menjadi pengganti karbohidrat.

Coto Manggala memiliki rasa yang unik dan berbeda dari soto pada umumnya. Singkong yang digunakan dalam sajian ini diolah sedemikian rupa hingga memiliki tekstur yang sangat lembut, hampir seperti kentang tumbuk, namun tanpa ada serat yang biasanya ditemukan dalam singkong. Proses perebusan singkong sebelum dimasak dalam kuah kaldu ayam menjadikannya lembut dan mudah dicerna. Kuah kaldu ayam yang gurih, namun tidak terlalu berat, memberikan rasa yang seimbang, sementara suwiran ayam kampung dan bihun menambah cita rasa khas yang sulit ditemukan di tempat lain.

Makanan ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner lokal yang dipengaruhi oleh budaya Banjar dan Melayu. Penggunaan singkong sebagai pengganti nasi dalam coto memberikan sentuhan yang unik dan menambah keberagaman cita rasa yang bisa dinikmati oleh para pelancong yang datang ke Pangkalan Bun. Saya merasa sangat puas setelah menikmati hidangan ini, tidak hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena saya bisa merasakan sebagian dari kekayaan budaya lokal melalui makanan tradisional yang masih lestari hingga kini.

Dengan kombinasi antara warisan sejarah di Istana Kuning dan kekayaan kuliner khas seperti Coto Manggala, Pangkalan Bun menjadi destinasi yang layak dikunjungi bagi mereka yang ingin mengenal lebih dalam sejarah dan budaya nusantara. Kota ini tidak hanya menawarkan pengalaman visual melalui peninggalan sejarah, tetapi juga menyuguhkan pengalaman rasa yang tak terlupakan. **aha/mh**

Banyak orang menjauh ketika melihat orang dengan gangguan jiwa. Tampilan lusuh, kumal, dekil, berbau tak sedap, dan berbicara "ngaco" membuat semua orang tak mau mendekat. Stigma itu membuat para penderita gangguan jiwa kerap mendapat perlakuan tak manusiawi.

Triana Rahmawati

Peduli Penderita Gangguan Jiwa

FOTO: IST

Triana Rahmawati, sebagai penggagas komunitas peduli orang dengan masalah kejiwaan (ODMK).

Ketika semua orang menjauhi dan memberi stigma, tidak pada sosok wanita yang satu ini. Adalah Triana Rahmawati yang peduli pada orang dengan masalah kejiwaan (ODMK). Lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS), Surakarta, 2015 ini, tergerak memanusiakan para ODMK. Ia kemudian menggagas komunitas peduli ODMK.

Perempuan kelahiran Palembang, 23 tahun lalu yang akrab dipanggil Tria menggagas gerakan peduli OMDK ini dengan mengajak anak muda bergabung dalam sebuah komunitas sosial yang ia beri nama Griya Schizofren. Secara umum Griya Schizofren memiliki arti gerakan sosial kemanusiaan dengan prinsip persahabatan. Komunitas ini dibentuk dengan tujuan memanusiakan penanganan para penderita gangguan jiwa.

Melalui komunitas ini, Tria dan dua rekan lainnya, Febrianti Dwi Lestari dan Yuni Wulandari mengampanyekan bahwa mereka yang memiliki gangguan jiwa membutuhkan kepedulian. Ia ingin anak-anak muda bisa mengubah anggapan tentang mereka yang memiliki gangguan kesehatan jiwa.

"Mereka ini membutuhkan kita. Kita perlu untuk tidak membuat jarak dengan mereka. Kita di sini peduli dan meperhatikan mereka, bukan sebagai psikolog atau dokter, tetapi sebagai teman," ujar Tria yang pernah diundang ke Kobe, Jepang untuk berbicara tentang Griya Schizofren.

Komunitas ini sudah aktif sejak tahun 2013. Berawal dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang kemudian disetujui dan didanai, Tria bekerja sama dengan Griya PMI Peduli Solo untuk menampung penderita ODMK. Kegiatannya meliputi membangun interaksi sosial, serta terapi menyanyi untuk membantu penyembuhan gangguan jiwa.

"Kegiatan kami ini bekerja sama dengan Griya PMI Solo. Kebetulan tempat itu menampung orang-orang dengan gangguan jiwa, dan kami masuk ke sana untuk memberikan terapi sosial lewat kasih sayang dan melalui kegiatan terapi menyanyi," ucap sosok yang pernah diundang sebagai Dewi Inspiratif di Reality Show Kick Andy beberapa waktu lalu ini.

Sebagai penggagas, Tria mengaku ingin mengusir stigma negatif masyarakat pada para penderita ODMK kuhususnya skizofrenia tersebut. Terlebih lagi, ia ingin mengajak kaum muda agar melek dengan keadaan sekitarnya.

"Kami ingin memuliakan sekaligus membantu penyembuhan penderita gangguan jiwa yang selama ini dianggap sebagai aib

dan terpinggirkan," tuturnya. Dengan Griya Schizofren, dia menjadikannya sebagai tempat di mana kasih sayang dan perawatan menjadi prioritas bagi mereka yang telantar hidup di jalanan, dititipkan keluarga, atau yang terjaring razia Satpol PP.

Griya Schizofren tidak hanya menawarkan tempat tinggal bagi mereka yang terlupakan, tetapi juga program pemulihan yang komprehensif. Dengan bantuan psikolog dan tenaga medis, Tria menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan mental dan fisik penghuni. Mereka diberikan terapi, pelatihan keterampilan, serta dukungan moral yang memungkinkan mereka untuk menemukan kembali makna hidup.

Tria harus menghadapi tantangan besar dari masyarakat sekitar. Masyarakat masih dipenuhi prasangka negatif terhadap ODMK, menganggap mereka sebagai ancaman. Ada warga yang menolak keberadaan Griya Schizofren, bahkan beberapa kali menimbulkan protes. Banyak orang yang tidak mengerti bahwa ODMK bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan mereka adalah manusia yang membutuhkan bantuan.

Stigma inilah yang menjadi penghalang utama bagi Tria dalam menjalankan misinya.

Selain tantangan sosial, ada pula masalah finansial yang kerap menghantui operasional Griya Schizofren. Dengan minimnya dukungan dari pihak luar, Tria dan kedua temannya itu sering kali harus merogoh kantong sendiri untuk mempertahankan keberlangsungan rumah ini.

Bantuan dari donatur memang ada, namun sering kali tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan harian. Namun, di balik semua kesulitan itu, Tria tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan bagi mereka yang berbuat kebaikan. Ia mengakui, setelah menekuni pendampingan ODMK sejak 2013, mulai muncul kejenuhan pada 2017. Padahal, ikhtiar perempuan kelahiran Palembang, 15 Juli 1992 ini, telah dilirik beberapa media sebagai contoh gerakan sosial yang menginspirasi.

"Tahun 2017, kami sudah masuk ke pemberitaan di beberapa media, tapi, kok, malah terjebak, tidak ada hasil yang kelihatan," kata Tria seperti dikutip tribunnews.com. Tiba-tiba ada yang mendaftarkannya sebagai calon penerima SIA. Tria tak menyangka bahwa ia menerima apresiasi SATU Indonesia Awards 2017 Bidang Kesehatan.

"Itulah titik balik kebangkitan semangat saya di komunitas yang didedikasikan untuk membantu ODMK. Ternyata masih ada yang percaya pada mimpi saya di komunitas ini tentang mengurai stigma dan mengapresiasi apa yang saya lakukan selama ini dari tokoh-tokoh yang saya kagumi," katanya.

Apa yang diperoleh dari Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards (SIA) ternyata tidak ternilai dan lebih berharga dibandingkan dengan nilai hadiah yang diterima. Itulah yang dirasakan Tria, peraih apresiasi kategori individu bidang kesehatan dari ajang tahunan yang diselenggarakan oleh PT Astra International Tbk.

"Pengalaman mengikuti SATU Indonesia Awards, value-nya jauh lebih besar dibanding nilai apresiasi yang saya peroleh," ujar Tria. Sebagai wujud rasa syukur menjadi salah satu penerima apresiasi SIA tahun 2017 lalu, Tria bertekad mengembalikan semua yang diterimanya untuk kontribusi bagi masyarakat melalui Griya Schizofren, volunteer yang membantunya sejak awal berdiri, dan untuk tempat kegiatan mengabdinya berlangsung. **hal/mh**

Biro Pemberitaan Parlemen

Hubungan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan media atau relasi media dilaksanakan melalui Biro Pemberitaan Parlemen. Kerja relasi media ini dioperasikan oleh ketiga bagian dari biro ini yakni, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Bagian TV dan Radio Parlemen, dan Bagian Penerbitan. Program yang dibentuk untuk menjalankan relasi dengan media antara lain adalah:

1. **BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL:**
   A. Memproduksi artikel berita, rilis pers maupun konten di *platform* media internal DPR RI untuk dapat diamplifikasi media massa nasional maupun lokal.
   B. Mengkoordinasikan peliputan media massa di kompleks parlemen. Kegiatan ini meliputi pendataan wartawan di lingkungan DPR RI bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Pendataan baik reguler untuk ID Pers tahunan maupun acara kenegaraan rutinan dan kegiatan khusus lainnya.
   C. Memfasilitasi kegiatan diskusi rutin yang dikelola KWP yakni "Forum Legislasi" dan "Dialektika Demokrasi" secara berkala. Kegiatan diskusi jadi ajang peliputan bagi media massa nasional untuk memberitakan kinerja kedewanan.
   D. Melaksanakan konferensi pers sesuai permintaan Pimpinan DPR RI, Pimpinan AKD DPR RI, maupun Pimpinan Setjen DPR RI. Selain itu juga mengatur lalu lintas *doorstop* media massa di kompleks parlemen maupun di luarnya, jika dibutuhkan.
   E. Menyosialisasikan kegiatan kedewanan lewat *blocking advertorial* di media massa cetak maupun *online* nasional.
   F. Menyosialisasikan kegiatan kedewanan lewat Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan

mengajak elemen jurnalis yang tergabung dengan KWP. Kegiatan ini dilakukan di berbagai daerah dalam rangka memperkuat sosialisasi kinerja dewan di seluruh Indonesia.

2. **BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN**
   A. Menyiarkan secara langsung kegiatan AKD DPR RI dan memproduksi program siaran berita di televisi dan radio internal DPR RI untuk dapat diamplifikasi media massa nasional maupun lokal.
   B. Memproduksi program televisi kerja sama dengan televisi nasional untuk mengamplifikasi pemberitaan kegiatan kedewanan.
   C. Melakukan kerja sama *Media Placement* dengan media siaran nasional, baik televisi maupun radio.
   D. Mengelola Relasi Media khusus media siaran, televisi dan radio, untuk acara kenegaraan. Seperti pada Sidang Tahunan 16 Agustus, bagian ini menyediakan *tv pool* dan mengoordinasikan *stand booth* untuk televisi nasional lainnya.

3. **BAGIAN PENERBITAN** Mengamplifikasi dan menjadi media agregator bagi seluruh produk pemberitaan yang diproduksi dua bagian di atas. Produk berita yang diamplifikasikan lewat *e-media* DPR RI juga menyasar jurnalis dan media massa luar untuk mengutipnya.

4. **MEDIA *BRIEFING*** merupakan kegiatan *talkshow* kolaborasi dengan Kordinatoriat Wartawan Parlemen yang mengangkat isu legislasi (forum legislasi) dan membahas isu yang sedang "in' di Indonesia (dialektika demokrasi).

5. **MEDIA VISIT** dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan perusahaan pers di Indonesia.

6. **BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN** menggembangkan konsep kerja perubahan untuk membuat tata kelola pemberitaan yang lebih modern, cepat, dan adaptif melalui konsep *newsroom.* Konsep kerja *newsroom* berupaya meleburkan ego sektoral di setiap *platform* media di Biro Pemberitaan Parlemen. Upaya ini telah dimulai sejak 2 tahun melalui konvergensi rapat redaksi biro setiap senin pagi. Rapat tersebut dipimpin oleh kepala Biro Pemberitaan Parlemen dan dihadiri kabag, kasubag serta redaksi tiap *platform* media.

7. **TIDAK HANYA ITU, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI JUGA SECARA AKTIF MEMBERIKAN *PERS RELEASE*,** insert berita DPR RI kepada media cetak maupun elektronik, dan bekerja sama dengan wartawan dan media dalam mendiseminasikan informasi mengenai kerja dan kinerja DPR RI. **bia/mh**

MEDIA CETAK DAN WEBSITE

Mengelola pemberitaan di media cetak dan *website*, serta melakukan pengelolaan konferensi pers. Adapun jenis media yang dikelola bisa dilihat setiap hari di situs berita www.dpr.go.id. Kemudian ada *Buletin Parlementaria* yang terbit setiap minggu. Terakhir, ada *Majalah Parlementaria* yang terbit setiap bulan.

PENERBITAN

Pelayanan informasi publik melalui percetakan majalah dan buletin bernama Parlementaria, yang didistribusikan di berbagai wilayah nasional dan internasional. Sebagai lembaga modern, DPR RI harus adaptif terhadap teknologi dengan mengembangkan produk publikasi dari cetak ke platform digital. Bagian penerbitan beralih ke Penerbitan Digital (E-Publishing) dengan membangun platform digital untuk memudahkan proses produksi, distribsi, dan publikasi. E-Media Parlemen dan E-Book DPR RI ditargetkan untuk anggota dewan, pegawai, mitra kerja, dan masyarakat umum, yang dapat diakses melalui berbagai perangkat digital, termasuk KiosKTouchscreen di area publik.

MEDIA SOSIAL

Mengelola beberapa akun media sosial, selain akun kelembagaan DPR RI juga mengelola akun *Fanpage* dan *Youtube* Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Beberapa media sosial yang dikelola subbagian media sosial diantaranya Intagram @DPR_RI dengan bentuk postingan siaran langsung, foto dan video kegiatan AKD dan desain grafis. Kemudian, X (Twitter) @DPR_RI dan Facebook DPR RI dengan bentuk postingan *link* berita *website* (www.dpr.go.id), Foto, desain dan video AKD, Desain TikTok @DPR_RI dan Thread @DPR_RI dengan bentuk postingan video edukasi DPR dan video kegiatan AKD. Terakhir, *Youtube* DPR RI dengan bentuk postingan video program medsos, video kegiatan AKD dan siaran Langsung.

ANALISIS MEDIA

Melakukan analisis media dan pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial. Adapun kegiatan harian yang dilakukan berupa Analis Media, Kliping Digital, Iktisar Berita, Rekomendasi Isu Aktual dan Ususlan Isu Harian untuk Media Internal DPR.
Subbagian Analisis Media mengirimkan hasil analisis media kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI. Hasil analisis media yang dikirimkan berupa ikhtisan berita dan rekomendasi isu aktual. Pengiriman dilakukan setiap hari melalui *WhatsAPP Gateway.*

TELEVISI DAN RADIO

Televisi dan Radio (TVR) Parlemen adalah unit produksi televisi dan radio siaran terbatas di bawah Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI. Dapat diakses lewat *streaming* di berbagai kanal media, yaitu *website* tvr parlemen. dpr.go.id, Instagram dan Facebook TVR Parlemen, kanal Youtube TVR Parlemen. TV Parlemen diresmikan 8 Januari 2007 oleh Agung Laksono. Awalnya, TV Parlemen hanya berupa TV dokumentasi. Kemudian sejak 2008 berkembang menjadi TV Internal DPR RI yang menyiarkan sidang-sidang paripurna, sidang komisi, dan alat kelengkapan dewan (AKD), sampai kunjungan kerja anggota dewan ke berbagai daerah.

Menjaga Kesehatan Mental Pada Ibu Pekerja. Apakah Penting?

Kesehatan jiwa atau sehat mental merupakan kondisi dimana seorang individu berada dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental yang akan berhubungan dengan kemampuan individu tersebut untuk tetap produktif dalam kehidupannya.

Oleh:
Ns. Hari Widiyatmini, S.Kep., M.Kep., Sp. Kepl
Universitas Indonesia

Belakangan isu kesehatan mental menggema cukup kencang dan berbagai macam dampak serius dari masalah kesehatan mental yang tidak dapat ditangani dengan baik sudah banyak terjadi. Pada tahun 2019 diperkirakan sebanyak 15% orang dewasa mengalami gangguan jiwa dan prevalensi tertinggi menunjukkan terjadi pada kalangan populasi pekerja.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia pada Agustus 2023 sekitar 54%, sedangkan sebuah survei dari *International Labour Organization* (ILO) menunjukkan bahwa sekitar 43% perempuan pekerja di Indonesia memiliki anak yang berusia di bawah 18 tahun. Artinya ibu pekerja adalah salah satu populasi yang rentan mengalami masalah kesehatan mental.

Mengapa ibu pekerja termasuk salah satu populasi yang rentan mengalami masalah kesehatan mental? Faktanya seorang ibu yang memutuskan tetap bekerja dan mengurus kehidupan rumah tangga harus menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pekerja profesional dan sebagai ibu rumah tangga. Kedua peran tersebut bisa memberikan tekanan tersendiri yang memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Beberapa masalah kesehatan mental yang sering terjadi pada ibu pekerja adalah stres, gangguan kecemasan dan yang paling berat dapat mengakibatkan terjadinya depresi.

Selain faktor menjalankan peran ganda, masalah kesehatan mental pada ibu pekerja juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya dukungan sosial seperti dukungan dari pasangan, keluarga, ataupun lingkungan pekerjaan. Faktor burnout atau kelelahan emosional juga menjadi salah satu faktor yang paling sering berpengaruh pada kesehatan mental ibu pekerja, dimana beban kerja dan jam kerja yang panjang serta tuntutan tanggungjawab di rumah dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi dan berdampak negatif pada motivasi dan kinerja pekerjaan.

Faktor lain yang sering terabaikan oleh ibu pekerja adalah kurangnya waktu sendiri atau *me time,* mereka sering tidak menyadari bahwa waktu untuk sendiri itu perlu dilakukan untuk merelaksasikan diri dan pikiran untuk menghindari terjadinya stres yang berlebihan.

Menjaga kesehatan mental ibu pekerja dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

Manajemen Waktu yang Baik

Membuat jadwal yang seimbang antara pekerjaan, waktu bersama

> **Faktor *burnout* atau kelelahan emosional juga menjadi salah satu faktor yang paling sering berpengaruh pada kesehatan mental ibu pekerja**

keluarga, dan waktu untuk diri sendiri dapat membantu mengurangi stres. Menetapkan batasan waktu kerja di rumah atau melakukan aktivitas bersama anak atau keluarga yang bisa dinikmati bersama.

Membangun Dukungan Sosial

Mencari dukungan dari pasangan atau keluarga, salah satu bentuk dukungan pasangan yang sangat membantu adalah meringankan pekerjaan rumah.

Mengenali dan Mengelola Emosi

Mengenali perasaan seperti stres, cemas, atau sedih dan mencari cara untuk menanganinya. Hal sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi stres atau cemas dengan melakukan teknik relaksasi napas dalam.

Mengatur Ekspektasi dan Menerima Keterbatasan

Penting untuk menyadari bahwa tidak ada ibu yang sempurna. Menurunkan standar yang terlalu tinggi untuk diri sendiri bisa membantu mengurangi tekanan. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan dan menghargai pencapaian kecil dalam keseharian.

Meningkatkan Kesadaran di Tempat Kerja tentang Pentingnya Kesehatan Mental

Mendorong dialog terbuka tentang kesehatan mental: lingkungan kerja yang terbuka terhadap isu kesehatan mental dapat memberikan rasa aman bagi ibu pekerja untuk menyampaikan kesulitan yang dihadapi.

Mengikuti *training* tentang cara mendukung kesejahteraan mental karyawan, termasuk ibu pekerja, dapat menciptakan budaya kerja yang lebih empatik dan suportif.

Gamal Albinsaid
Aktif Berolahraga dan Menulis

Di tengah kesibukan sebagai anggota DPR RI, Gamal Albinsaid selalu mengutamakan kesehatan. Ia aktif berolahraga dengan *badminton*, bersepeda, dan *gym*. Ini adalah rutinitas olahraga favoritnya.

FOTO: GERALDI/VEL

Anggota DPR RI, Gamal Albinsaid, saat diwawancara Parlementaria di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I.

HOBI DAN KESEHATAN

"Olahraga penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, terutama dalam menjalani tugas yang berat ini," jelasnya. Ia juga mengaku, senang membaca dan menulis. "Menulis adalah cara saya untuk merenung dan menganalisis data yang relevan dengan pekerjaan saya di DPR," katanya. Hingga kini, ia telah menerbitkan empat buku dan banyak artikel.

Selain berfokus pada dunia kesehatan, Gamal peduli terhadap pendidikan. Melalui inisiatif "Malang Cerdas," ia telah memberikan lebih dari 4.500 beasiswa untuk pelajar di Malang Raya. "Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik," ungkapnya.

Bukan hanya itu, program "Gamal Gustus Kur" juga sukses menarik perhatian, dengan lebih dari 275 sekolah yang terlibat. "Saya ingin mengunjungi seribu sekolah, dan menginspirasi lebih dari 500 ribu pelajar," katanya penuh semangat.

MOTIVASI KELUARGA

Saat ditanya tentang motivasi keluarga, Gamal mengungkapkan bahwa ayahnya, Pak Saleh, adalah sosok yang sangat mendukung. "Sejak kecil, kami sering berdiskusi tentang berita dan politik. Beliau menanamkan nilai-nilai penting dalam diri saya," kenangnya.

Gamal juga mengagumi tokoh-tokoh seperti Bung Hatta dan B.J. Habibie, yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. "Mereka adalah teladan yang mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri," tuturnya.

MENGHADAPI TANTANGAN DAN HARAPAN

Meski menghadapi banyak tantangan dalam politik, Gamal tetap optimis. "Saya percaya bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil. Yang terpenting adalah konsistensi dan integritas dalam menjalankan amanah ini," tuturnya.

Di akhir wawancara, Gamal mengingatkan bahwa inspirasi sejati datang dari tindakan nyata. "Jika kita ingin akhir hayat kita penuh dengan senyuman, maka buatlah sebanyak mungkin orang tersenyum lewat amanah yang kita emban," pungkasnya.

Dengan semangat dan dedikasinya, Gamal menjadi sosok yang tidak hanya menginspirasi banyak orang, tetapi juga menunjukkan bahwa setiap individu dapat berkontribusi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

KLINIK ASURANSI SAMPAH

Ketika masih aktif kuliah, ia melihat kenyataan yang menyedihkan. Salah satu pengalaman yang sangat membekas adalah ketika mendengar cerita tragis tentang seorang anak bernama Heronisa yang meninggal di gerobak sampah karena sakit. Pengalaman itu menggugahnya menciptakan "klinik asuransi sampah," dimana warga dapat berobat dengan menukarkan kardus plastik sebagai pembayaran. Inovasi ini menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat, terutama yang kurang mampu.

Selain itu, ia juga mengembangkan *platform* digital "Siapa Penduduk ID," yang bertujuan menggalang dana untuk membantu pasien yang membutuhkan biaya tinggi untuk pengobatan. "Kami ingin menjamin bahwa kesehatan adalah hak semua orang," jelasnya. **rdn/mh**

Kala Ultraman Masuk Senayan

Ada yang menarik dalam pelantikan calon anggota DPR dan DPD terpilih periode 2024-2029 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10) lalu. Sosok superhero Jepang, Ultraman, tiba-tiba muncul dan melenggang di selasar Gedung Nusantara II. Belakangan diketahui, dia adalah Anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II Jamaludin Malik.

Anggota DPR RI Jamaludin Malik saat menggunakan kostum Ultraman sebelum acara pelantikan calon anggota DPR dan DPD RI periode 2024-2029 di kompleks parlemen.

Aksi Ultraman masuk Senayan ini menjadi perhatian para wakil rakyat maupun keluarga yang menghadiri acara pelantikan. Jamaludin Malik mengaku sengaja menggunakan kostum Ultraman itu, karena menjadi ciri khasnya yang telah dibangun selama masa kampanye lalu. "Ultraman itu membasmi kejahatan," kata Jamaludin saat ditanya oleh para pewarta.

Beberapa orang pun sempat meminta foto bersama Jamaludin yang menggunakan kostum Ultraman yang memiliki warna silver, merah, dan biru. Dia mengaku, mengenakan kostum itu hanya sesaat sebelum acara pelantikan dimulai. Setelah memasuki ruangan pelantikan, dia kembali menggunakan baju formal.

Sebanyak 580 orang anggota DPR RI terpilih dan 152 anggota DPD RI berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 periode 2024-2029 resmi dilantik awal Oktober lalu. Menarik untuk menyaksikan aksi Jamaludin Malik 'Sang Ultraman' dan 579 orang anggota DPR RI lainnya di Senayan. Yuk kawal terus rumah rakyat kita.

we/mh

SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI PAHLAWAN

10 NOVEMBER 2024

DPR RI DPR RI @dpr_ri @dpr_ri @dpr_ri @dpr_ri